



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2014**

(Evaluasi pada Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

**THE EVALUATIONS OF IMPLEMENTATION OF RICE FOR
POOR FAMILIES PROGRAM AT THE YEAR 2014**

(Evaluations In The Village of Sruni, Jenggawah District, Jember Regency)

SKRIPSI

Oleh

Riska Yulinda

NIM 110910301005

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**EVALUASI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN) TAHUN 2014**

(Evaluasi pada Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

**THE EVALUATIONS OF IMPLEMENTATION OF RICE FOR
POOR FAMILIES PROGRAM AT THE YEAR 2014**

(Evaluations In The Village of Sruni, Jenggawah District, Jember Regency)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Riska Yulinda

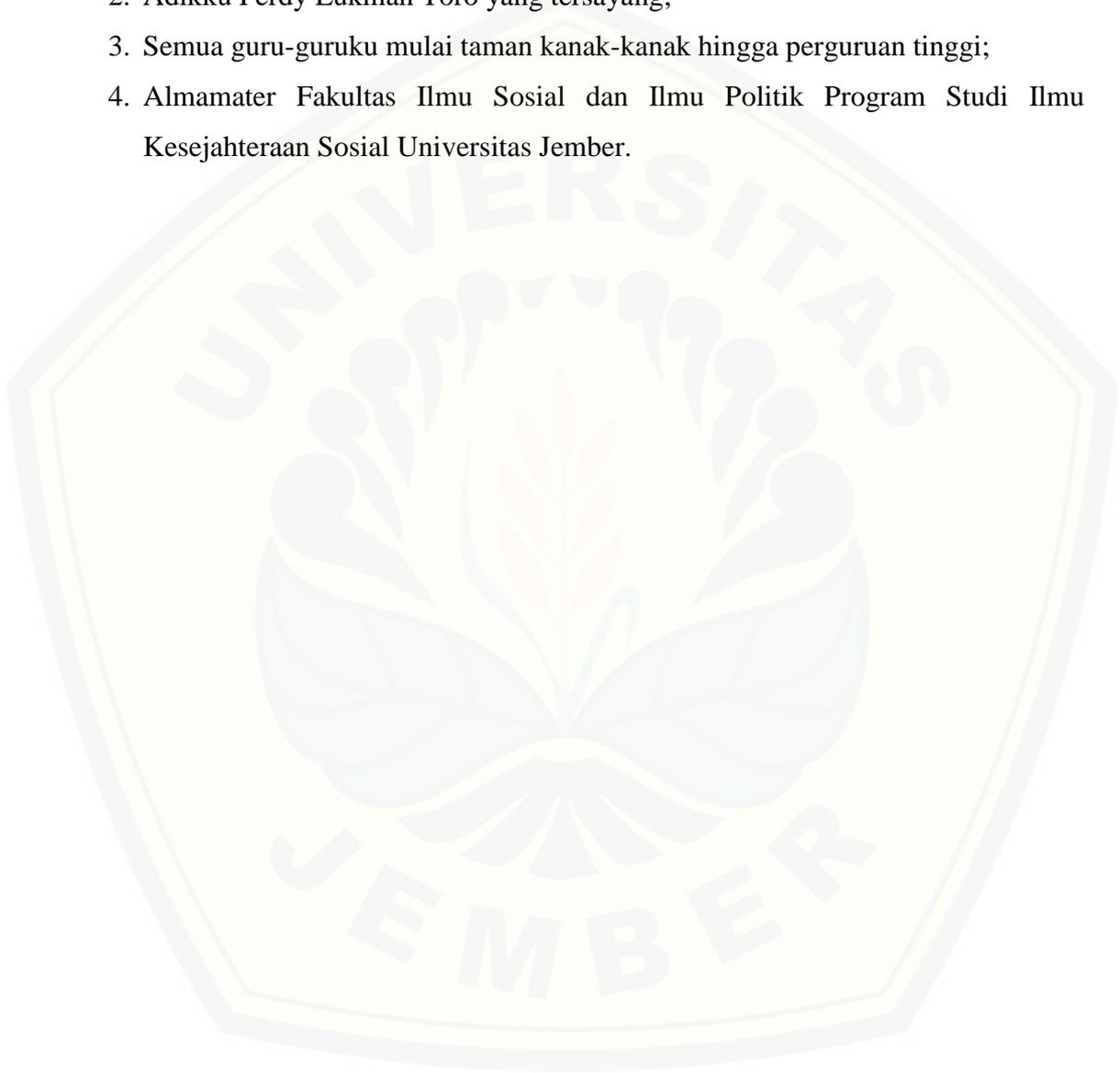
NIM 110910301005

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Muchlis dan Ibunda Rosyida yang tercinta;
2. Adikku Ferdy Lukman Toro yang tersayang;
3. Semua guru-guruku mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.



MOTTO

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju Surga.”

(HR. Turmudzi dan Hakim) *)

“Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Alloh maka dia akan ditakuti oleh segalanya, dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia akan takut dari segala sesuatu.”

(Assayid Ahmad Al Hasyimi **)

*) Syaikh Imam Nawawi. 2000:86. *Hadits-hadist Ar ba'in Nawawiyah*. Solo: Intermedia

**) Assayid Ahmad Al Hasyimi. 2002:99. *Muhtarul Ahadis An Nabawiyah*. Darul Iلمي: Surabaya.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Yulinda

NIM : 110910301005

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014” (Evaluasi pada Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Februari 2016

Yang menyatakan,

Riska Yulinda

NIM 110910301005

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)
TAHUN 2014**

(Evaluasi pada Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

Oleh

Riska Yulinda

NIM 110910301005

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Wahyudi., M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Belgis H. Nufus, S.Sos., M.Kesos

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2014” (Evaluasi pada Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember) telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 29 Februari 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,



Dr. Partono, M.Si

NIP. 195608051986031001

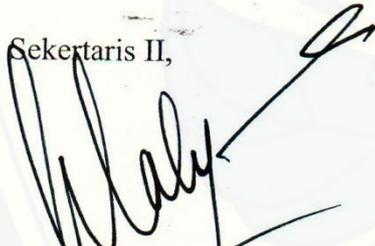
Sekretaris I,



Belgis H. Nufus, S.Sos., M.Kesos

NRP. 760014661

Sekretaris II,



Dr. Djoko Wahyudi, M.Si

NIP. 195609011985031004

Anggota I,



Kris Hendrijanto S.Sos., M.Si

NIP. 197001031998021001

Mengesahkan

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 (Evaluasi pada Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)". Riska Yulinda, 110910301005, 128 halaman, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Latar belakang, tingginya angka kemiskinan di Indonesia membuat pemerintah berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut dikelompokkan menjadi empat klaster yang berdasarkan kelompok sasarannya (*targetting program*). Program Raskin merupakan salah satu Program dari Klaster 1 yang merupakan Klaster untuk bantuan dan perlindungan sosial yang mencakup hal-hal mendasar yang harus dipenuhi dalam masyarakat. Tujuan program Raskin mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg RTS/bulan.

Penelitian ini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin tahun 2014 di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Desa Sruni dengan melihat pelaksanaan program Raskin tahun 2014, dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan program Raskin pada tahun `2014 di Desa Sruni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi diskrepansi yaitu menggambarkan ketimpangan antara standar kinerja dengan kinerja yang terjadi dengan menggunakan *Best Practice Standarts* dalam menentukan kriteria evaluasi dengan memfokuskan penelitian ini pada aspek

proses pelaksanaan program. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui pengumpulan data mentah, traskip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.

Hasil avaluasi dan analisa yang didapat bahwa pelaksanaan Raskin di Desa Sruni belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan perencanaan program. Dalam pelaksanaan Program Raskin ini terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah hambatan pada proses penetapan sasaran, jumlah masyarakat miskin lebih banyak dari pada pagu yang ditetapkan pemerintah, masyarakat miskin tidak mampu membayar terbusan dan hambatan yang berasal dari masyarakat Desa Sruni sendiri.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program, Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Desa Sruni

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 (Evaluasi pada Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof . Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA, selaku Ketua Jurusan Progam Studi Ilmu Kesejahteraan sosial
3. Ibu Belgis Hayyinaton Nufus, S.Sos, M.Kesos., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya yang telah membantu kelancaran administrasi penulis.
6. Bapak Nanang Kusminarno, SH. selaku Kepala Desa yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sruni.
7. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Desa Sruni yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
8. Kedua orang tuaku Ayahanda Muchlis yang dengan gigih berjuang dan mengucurkan keringat penuh harapan agar putra-putrinya mampu menjadi insan yang lebih baik dan mampu menggapai cita-cita yang diimpikan. Ibunda

Rosyida yang telah melimpahkan segala cinta dan kasih sayangnya, yang selalu mendoakan dan berjuang demi kesuksesanku.

9. Saudara-saudaraku, Debong (Debby), Mbok Pqiul (Fiqya), Mbak Pimun (Pipin), Ana, Laili, Encop (Shofia), Adi, Bagus, Septri, yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas pengalaman dan kenangan yang telah kita rajut bersama selama Empat tahun.
10. Teman-temanku Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun angkatan 2011, terima kasih atas pengalaman luar biasa bersama kalian selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Sahabat-sahabatku mbak Ipi (Silviana), Emak (Rini), dan adik-adikku di kostan Karimata 4 No. 28A, Selvy, Arum, Rissa yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi khalayak umum.

Jember, Februari 2016

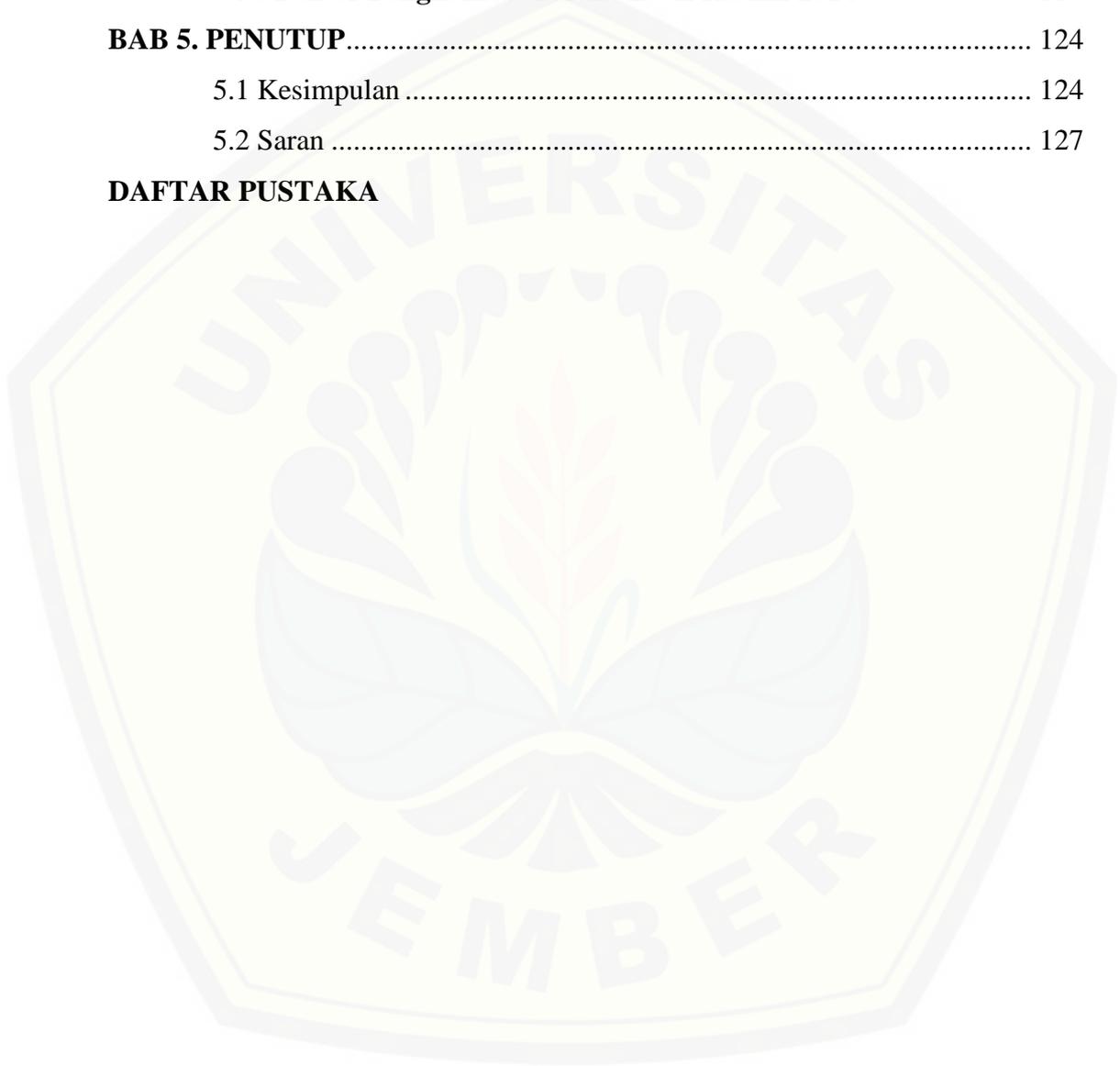
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Kemiskinan	8
2.2 Kebijakan Sosial	15
2.3 Konsep Pelaksanaan (Implementasi) Kebijakan	17
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	17
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan.....	19
2.3.3 Sosialisasi Implementasi Kebijakan	21
2.3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	21
2.3.5 Program Bagian dari Kebijakan.....	25

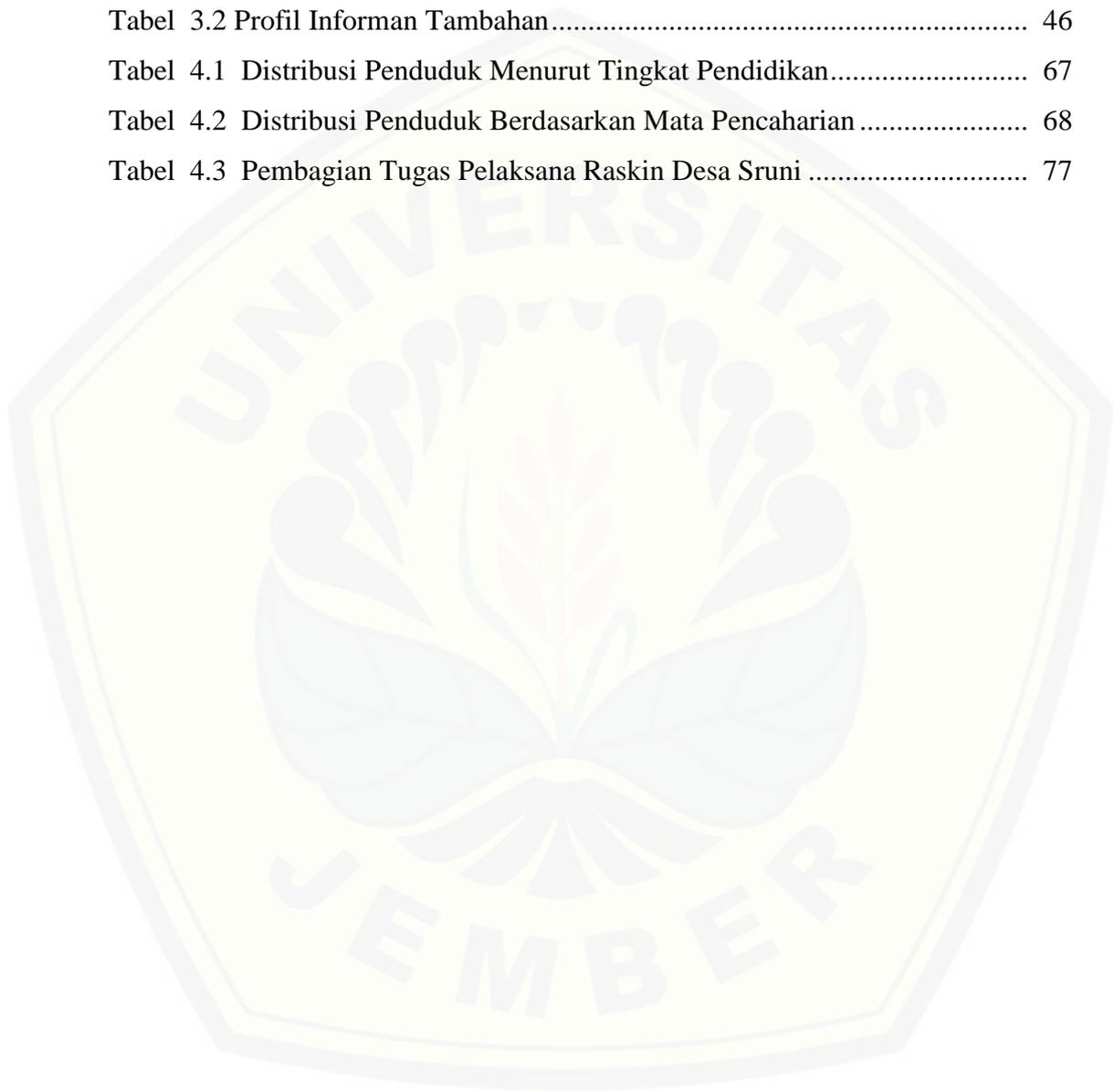
2.4 Program Beras untuk Keluarga Miskin	26
2.5 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	33
2.7 Alur Penelitian	35
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian.....	39
3.3 Model Evaluasi	41
3.4 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian	43
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Observasi	47
3.5.2 Wawancara.....	54
3.5.3 Dokumentasi	62
3.7 Teknik Analisis Data.....	62
3.8 Teknik Keabsahan Data	64
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	66
4.1.1 Kondisi Geografis	63
4.1.2 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	63
4.1.3 Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	67
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	68
4.2 Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	69
4.2.1 Pedoman Pelaksanaan Program Raskin 2014	70
4.2.2 Pelaksana Program Raskin 2014 Desa Sruni	73
4.2.3 Mekanisme Penetapan RTS-PM	78
4.2.4 Penetapan Titik Bagi.....	94
4.2.5 Mekanisme Pelaksanaan	96
4.2.5.1 Sosialisasi Program Raskin	96
4.2.5.2 Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB	

hingga RTS-PM.....	99
4.2.5.3 Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR).....	111
4.2.6 Monitoring dan Evaluasi	116
4.2.7 Pelaporan	117
4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Raskin 2014	118
BAB 5. PENUTUP.....	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	



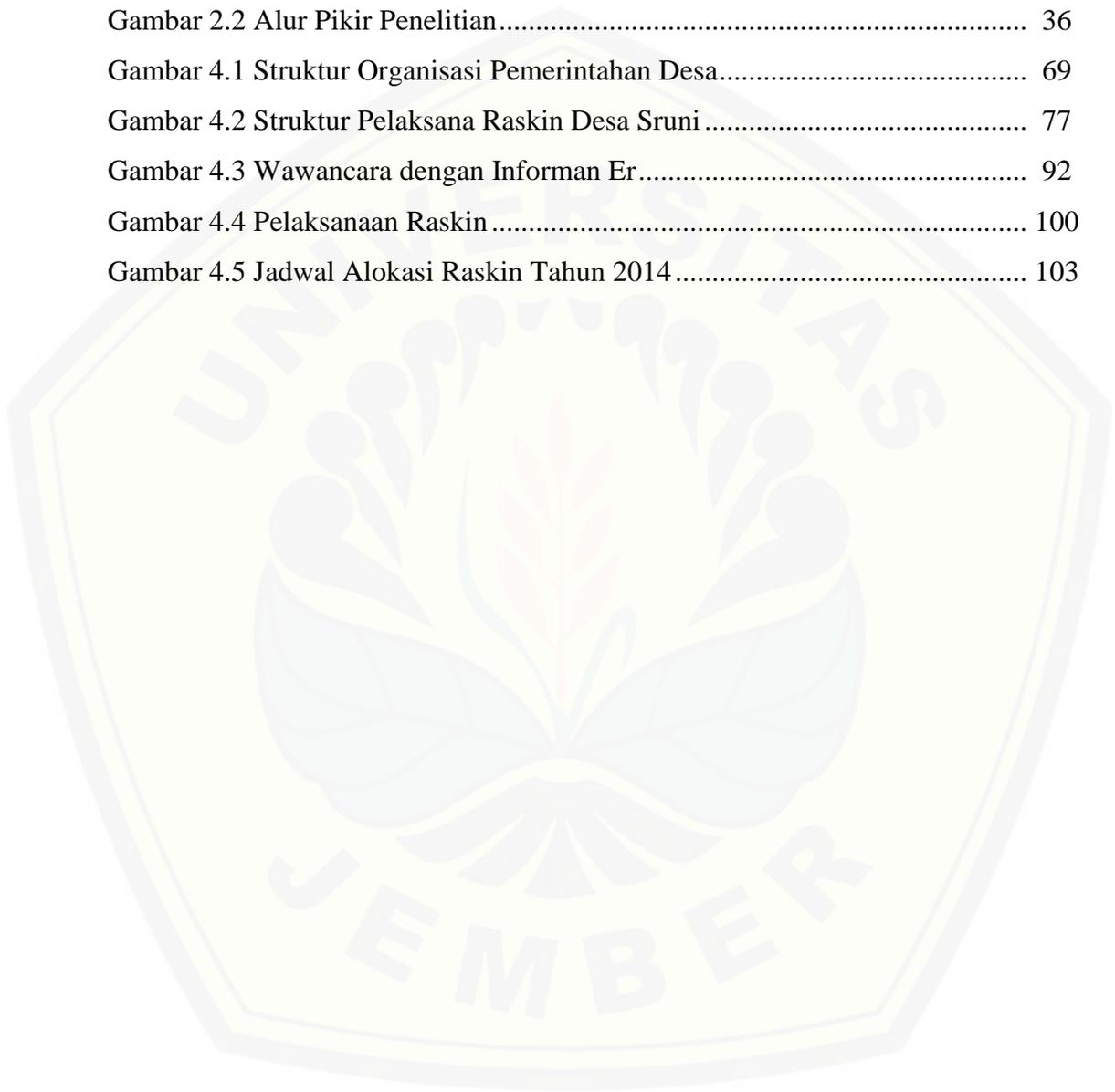
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Profil Informan Pokok	45
Tabel 3.2 Profil Informan Tambahan.....	46
Tabel 4.1 Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	67
Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	68
Tabel 4.3 Pembagian Tugas Pelaksana Raskin Desa Sruni	77



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Perumusan Kebijakan	16
Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	69
Gambar 4.2 Struktur Pelaksana Raskin Desa Sruni	77
Gambar 4.3 Wawancara dengan Informan Er.....	92
Gambar 4.4 Pelaksanaan Raskin	100
Gambar 4.5 Jadwal Alokasi Raskin Tahun 2014.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kajian terhadap penelitian terdahulu
- Lampiran 2. Taksonomi Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 (Evaluasi pada Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- Lampiran 3. Pedoman wawancara Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 (Evaluasi pada Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- Lampiran 4. Transkrip Reduksi
- Lampiran 5. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 6. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Jember
- Lampiran 7. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Kantor Kecamatan Jenggawah
- Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kepala Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik yang terjadi pada banyak negara terutama negara berkembang. Tidak ada satu negara pun yang mampu terhindar dari kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dijumpai di Indonesia, Sri Lanka dan Argentina, melainkan juga pada negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia dan Hongaria (Suharto, 2009:14) Indonesia yang merupakan negara berkembang juga mempunyai permasalahan kemiskinan yang cukup berat. Dalam pendataan penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259.940.857 (<http://www.kompas.com.html> diakses 7 maret 2014), sedangkan di Indonesia tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2011 adalah 12,49% atau 30 juta orang (kemkominfo, 2011). Pada September 2012 tercatat sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen), dan pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), (<http://www.bps.go.id> diakses 1 maret 2014). Sedangkan jika dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, selama periode September 2012 - Maret 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta orang pada September 2012 menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013), sementara di daerah pedesaan berkurang 0,35 juta orang (dari 18,09 juta orang pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada Maret 2013) (<http://www.bps.go.id/?news=1023> diakses 5 maret 2014).

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, ditingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005-2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin pertahun sebesar 0,8 % jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal

Kamboja, Thailand, China dan Brasil yang hanya dikisaran 0,1 % pertahun (kemkominfo, 2011).

Dengan prosentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih begitu tinggi walaupun telah terjadi penurunan dari tahun ke tahun, ada tiga faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia yang hingga kini belum bisa diberantas, ke tiga faktor itu menurut Suyanto (1996;11) adalah, *pertama*: kesalahan menganggap kemiskinan sebagai fenomena *single dimension*, yakni masalah pendapatan saja, padahal kemiskinan hakikatnya adalah *multi dimensions*. Kemiskinan bukan sekedar persoalan kurangnya atau akses yang rendah terhadap lalu-lintas uang dan barang. Tetapi, kemiskinan sesungguhnya juga berkaitan dengan empat dimensi kemiskinan lain, yaitu kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi, dan ketidak berdayaan atau yang disebut Robert chambers (1980) dengan istilah *integrated poverty*. *Kedua*: kesalahan menganggap fenomena “lingkaran kemiskinan” (*vicious circle of poverty*) sebagai satu kawasan tersendiri yang tidak berkaitan dengan fenomena “lingkaran berlebihan” atau “lingkaran kemewahan” (*vicious circle of affluence*). *Ketiga*: kesalahan menganggap prioritas pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan berpola konsentrik sebagai jalan utama bagi terciptanya pemerataan termasuk pemerataan kesempatan kerja dikemudian hari.

Merupakan suatu tantangan besar bagi pemerintah untuk dapat segera menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia agar tidak berdampak pada kondisi sosial yang lain seperti semakin banyaknya gelandangan, pengemis, anak jalanan, prostitusi dan lain-lain. Pemerintah tidak hanya diam dalam merespon isu tersebut, namun juga melakukan usaha-usaha penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan dan program-program sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya Perpres tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wakil Presiden Boediono untuk menurunkan kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014 (kemkominfo, 2011:2).

Perpres tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional. TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu tugas dari TNP2K adalah menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, TNP2K membentuk program-program penanggulangan kemiskinan bersasaran (*targeted program*). Program-program tersebut disasarkan langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan dekat miskin. Program-program tersebut dikelompokkan menjadi klaster 1 hingga klaster 4. Klaster 1 merupakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran rumah tangga dan keluarga, klaster 2 merupakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas, klaster 3 program penanggulangan kemiskinan bersasaran usaha mikro dan kecil, dan klaster 4 merupakan program peningkatan dan perluasan program pro rakyat (TNP2K, 2011). Klaster 1 merupakan klaster bantuan dan perlindungan sosial dimana mencakup hal-hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi dalam masyarakat, bantuan sosial ini mencakup empat komponen program didalamnya. Pertama, bantuan langsung kepada keluarga sasaran, programnya mencakup bantuan langsung dalam bentuk *inkind* (Raskin), bantuan langsung tunai bersyarat (PKH), bantuan langsung tanpa syarat (BLT), dan bantuan bagi masyarakat yang rentan seperti penduduk yang cacat, lansia, yatim piatu dan lain-lain. Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini yang tercakup dalam Program Bantuan Pendidikan untuk Rumah Tangga Miskin. Ketiga, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting educations*) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk, programnya berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Keempat, bantuan penanggulangan pengangguran sementara (*cash for work*).

Dari beberapa program yang terdapat di klaster 1 program Raskin merupakan program yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 1998 sebagai konsekuensi dari adanya penarikan subsidi BBM oleh pemerintah pusat yang dirasa pemerintah akan memberikan dampak terhadap kenaikan harga bahan-

bahan pokok dipasaran termasuk beras. Program Raskin sejak awal berdirinya bernama Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang bernaung di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dimana harga beras OPK ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp. 1000/kg, dengan alokasi 20 kg/RTS/Bulan yang diberikan selama 12 bulan alokasi, kemudian pada tahun 2002 program ini berubah nama menjadi program Raskin untuk lebih mencerminkan sifat dan sasaran program yaitu sebagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan bukan sebagai program penanggulangan dampak krisis ekonomi (Bulog, 2013).

Raskin masuk dalam klaster 1 karena peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada maret 2013 tercatat sebesar 73,52 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi september 2012 yang sebesar 73,50 persen (http://bps.go.id/website/brs_ind/kemiskinan. diakses 7 maret 2014). Tujuan program Raskin sendiri adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg RTS/bulan (Pedum Raskin 2014).

Penerima manfaat Raskin di seluruh Indonesia pada tahun 2014 telah ditetapkan sebanyak 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dimana setiap bulan di seluruh Indonesia akan disalurkan Raskin paling tidak sebanyak 233 ribu ton, sehingga Raskin tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan pada tingkat keluarga, akan tetapi juga akan berpengaruh positif terhadap stabilitas harga beras di pasar” ”(www.menkokesra.go.id. 28 maret 2014). Untuk Jawa Timur RTS penerima manfaat Raskin 2014 mencapai angka 3.401.749 (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/03/18/.28_maret_2014). Sedangkan untuk kabupaten Jember jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin 2014 masih sama dengan tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu berjumlah 192.951 dengan pagu raskin sebesar 34.731.180 kg (Data

sekunder Kab. Jember). Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, Kecamatan Jenggawah merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang mendapatkan alokasi pagu Raskin di atas satu juta kilogram, yaitu 1,071,180 kilogram untuk pagu 12 bulan pada tahun 2014 dengan pagu tiap bulannya 89,265 kilogram perbulan yang dibagikan kepada 5,951 rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin yang terbagi dalam 8 desa.

Desa Sruni merupakan salah satu desa di Kecamatan Jenggawah yang mendapatkan pagu Raskin yaitu 7,335 kg dengan jumlah penerima 489 RTS. Jumlah ini masuk dalam urutan ke dua pagu Raskin terendah dari delapan Desa dikecamatan Jenggawah, dimana Desa Cangkring 20,235, Desa Jenggawah 16,860 kg, Jatisari 11,535 kg, Kertonegoro 10,455 kg, Wonojati 8,655 kg, Kemuningsari Kidul 7,620 kg, Desa Sruni 7,335 dan yang terendah Desa Jatimulyo 6,480 kg perbulan. Di desa Sruni terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pembagian Raskin, seperti yang diperoleh dari observasi awal di dusun Darungan. Raskin di Dusun Darungan dibagikan dengan sistem pemerataan. Setiap warga dusun mendapatkan alokasi Raskin, mulai dari keluarga yang benar-benar miskin maupun warga yang bukan merupakan keluarga miskin. RTS yang seharusnya mendapatkan 15 kg/bulan hanya mendapatkan 2 setengah sampai dengan 3 kg/bulan, beberapa RT diantaranya terdapat perbedaan dalam alokasi Raskin. Perbedaan tersebut terletak pada waktu penerimaan Raskin, sebagian RTS dari beberapa RT di Dusun Darungan tersebut harus menerima Raskin dengan jumlah yang sama dalam waktu 2 bulan sekali karna RTS harus bergantian dengan RTS lainnya setiap kali alokasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pembagian Raskin yang seharusnya diberikan dengan kondisi di lapangan. Ketidaksesuaian pelaksanaan Raskin tersebut tidak ditemukan pada desa yang lain dan hanya ditemukan di Desa Sruni. Sedangkan hasil kajian kementerian Koordinator Bidang Kesra bersama perguruan tinggi tahun 2013 menunjukkan rata-rata kebutuhan beras bagi rumah tangga miskin sebesar 30 – 40 kg setiap bulan, sehingga Raskin memberikan kontribusi positif sebesar 40 % terhadap kebutuhan beras RTS jika Raskin dibagikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan. Kajian tersebut dilaksanakan dengan asumsi pagu Raskin sebesar 15

kg/RTS/bulan. Program Raskin untuk tahun 2014 telah mendapat persetujuan DPR sebanyak 180 kg/RTS atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan (www.menkokesra.go.id, 28 maret 2014). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk lebih lanjut melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan maupun perkembangan program.

1.2 Rumusan Masalah

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras 15 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.600/kg. Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan 6T, yaitu: Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan ketidaksesuaian, yaitu Raskin yang dibagikan tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu, dan tidak tepat sasaran, sedangkan ketiganya merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan program Raskin, Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Desa Sruni, Kecamatan jenggawah Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni Kecamatan jenggawah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Moleong (2002:62) tujuan suatu penelitian ialah memecahkan suatu masalah, yang dilakukan dengan jalan menyimpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan tersebut. Tujuan penelitian sangat penting dalam seluruh proses kegiatan penelitian agar tidak terjadi kesalahan yang

dapat membuat penelitian tersebut tidak relevan. Tujuan penelitian juga membantu peneliti dalam menentukan arah penelitian agar tidak mengalami kesulitan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program raskin di Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Raskin 2014 di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Antara lain:

- a) Bagi disiplin ilmu kesejahteraan sosial dapat memperkaya studi mengenai evaluasi pelaksanaan dari kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b) Sebagai masukan bagi para pelaksana Program Raskin bahwa evaluasi pelaksanaan program dapat membantu program, terutama untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya, agar program Raskin dapat mencapai tujuannya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan adalah uraian atau teori-teori yang akan membahas kemiskinan secara menyeluruh, di dalamnya dibahas mengenai definisi kemiskinan, penyebab kemiskinan, indikator kemiskinan, dan usaha penanggulangan kemiskinan.

A. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Menurut Bank Dunia (Dalam Haughton, 2012:2), kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan, sedangkan, kesejahteraan menurut Amartya Sen berasal dari kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak mempunyai kemampuan-kemampuan utama. Tidak memiliki pendapatan atau mendapatkan pendidikan yang memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, memiliki kepercayaan diri yang rendah atau suatu perasaan tidak berdaya, atau tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara (Haughton, 2012:3). John Friedman (Dalam Suyanto, 2013:2-3) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Sedangkan basis kekuatan sosial menurut Friedman meliputi: Pertama, modal produksi atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Levitan (Dalam Suyanto, 2013:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan Piven Cloward dan Swason dalam Suharto (2009:15) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan

kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. *Kekurangan materi*, kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar. *Kekurangan penghasilan* dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda dari suatu negara ke negara lainnya, bahkan dari suatu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclutions*), ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai suatu kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Menurut Suyanto (2013:5) Pada dasarnya ada beberapa ciri kemiskinan, yaitu:

1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar.
4. Banyak diantara mereka yang tinggal didaerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali.
5. Banyak diantara mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan.

B. Penyebab Kemiskinan

Kondisi kemiskinan secara teoritis diakibatkan karena adanya kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi ketidakseimbangan antara

permintaan dan penawaran, terjadinya pengangguran, kesenjangan dan kemiskinan yang dapat disebut sebagai perangkap atau lingkaran kemiskinan (poverty trap), yaitu sebuah lingkaran proses pemiskinan yang semakin lama semakin kronis, sehingga secara bertahap dapat menghancurkan tatanan ekonomi suatu negara (Sumodiningrat, 2009:8). Robert Chambers juga mengatakan bahwa, inti dari masalah kemiskinan adalah sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: 1) kemiskinan itu sendiri, 2) kelemahan fisik, 3) keterasingan atau kadar isolasi, 4) kerentanan, dan 5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkaitan satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup seseorang atau keluarga miskin (suyanto, 2013, hal. 12).

Haughton (2012:159-164) mengemukakan penyebab utama yang berhubungan dengan kemiskinan antara lain adalah:

- a. Karakteristik wilayah , mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintahan serta hak milik dan pelaksanaannya.
- b. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan air, listrik) dan layanan (kesehatan dan pendidikan) kedekatan dengan pasar dan pelaksanaannya.
- c. Karakteristik rumah tangga dan individu, diantaranya yang paling penting adalah : *Demografis*, seperti jumlah anggota rumah tangga, usia, struktur, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga; *Ekonomi*, seperti status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki ; dan *Sosial*, seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan tempat tinggal.

Lebih spesifik lagi, Suharto (2009:17) menjelaskan bahwa secara konseptual kemiskinan dapat diakibatkan oleh empat faktor yaitu:

1. faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan.
2. faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin misalnya diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang

menyebabkan seseorang yang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;

3. faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan (Suharto, 2008b). Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin;
4. faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari, kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

C. Indikator Kemiskinan

Pada tahun 1973, WHO/FAO merekomendasikan tentang jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia yang besarnya masing-masing 1.900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Berdasarkan ukuran tersebut, Sajogyo telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut (Suyanto, 2013:4):

- 1) Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram pertahun (kurang dari 35 kilogram perbulan).
- 2) Untuk daerah pedesaan seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi 320 kilogram (± 26 kilogram perbulan), miskin sekali apabila mengkonsumsi 240

(20 kilogram perbulan) dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram pertahun (15 kilogram perbulan).

Menurut Prof. Sayogya dalam Wahyuddin (2012:44) garis kemiskinan dinyatakan dalam Rp./tahun, ekuivalen dengan nilai tukar beras (kg/orang/bulan yaitu untuk desa 320kg/orang/tahun dan untuk kota 480kg/orang/tahun). Atas dasar ukuran ini maka mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal keterampilan, dan sebagainya.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau model usaha.
3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan tinggal didesa sebagai pekerja bebas (*self employed*), berusaha apa saja.
5. Banyak yang berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.

D. Penanggulangan kemiskinan

Secara konseptual, perlu dipahami bahwa upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak dilakukan dengan cara sepotong-sepotong, parsial, dan hanya bersifat temporer, program-program intervensi yang dikembangkan harus benar-benar komprehensif, tidak berhenti hanya pada aspek ekonomi kemiskinan saja, tetapi juga perlu menyentuh perbaikan pada aspek kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani dan keterisolasian (Suyanto, 2013:244). Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan nasional Indonesia adalah 13,33 persen (%), atau 31,02 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Dari maret 2009 hingga maret 2010, 14,7 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan, tetapi 13 juta lainnya kembali ke garis kemiskinan, ini berarti bahwa secara absolut hanya sekitar 1,5 juta penduduk yang keluar dari kemiskinan (TNP2K. 2011). Untuk mendukung pencapaian target penurunan angka kemiskinan secara nasional

sebesar 8-10 persen akhir tahun 2011 pemerintah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) ditingkat nasional, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, strategi utama yang dilakukan adalah dengan beberapa cara yaitu:

1. Memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup didaerah terpencil. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi guncangan (*shocks*) dalam kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. Strategi yang pertama ini dituangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin. Akses tersebut seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, pangan dan gizi yang diharapkan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin dan nantinya juga diharapkan dari sini dapat mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).
3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dimana tidak hanya memperlakukan masyarakat miskin sebagai objek pembangunan namun juga mereka sendiri yang harus berupaya keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi mereka sendiri.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan dapat mengurangi kemiskinan secara berarti.

Dari keempat strategi penanggulangan kemiskinan di atas kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk realisasi program-program sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I) yang didalamnya mencakup program-program seperti Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH- *conditional cash transfer*), bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
2. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran Komunitas (Klaster II)
Program ini dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (*community driven Development*). contohnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III), tujuan program ini adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV), yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran program pro rakyat adalah masyarakat dengan golongan pendapatan menengah ke bawah. Sehingga rakyat mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan harga yang terjangkau, dengan sebagian biaya ditanggung pemerintah berikut upaya-upaya menjaga ketersediaan melalui regulasi dan program pemerintah. program yang termasuk dalam Klaster IV ini antara lain Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih untuk Rakyat, Program Listrik Murah dan Hemat.

2.2 Kebijakan Sosial

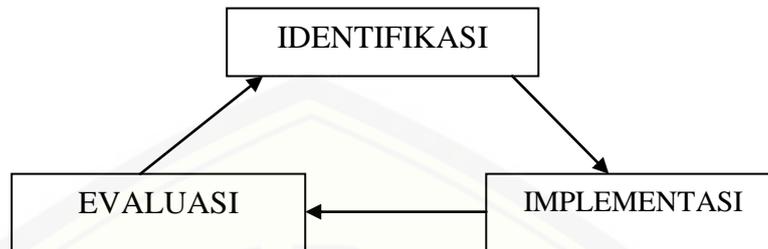
Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara (Suharto, 2011:3). Menurut

Bessant, Watts, Dalton dan Smith (Dalam Suharto, 2011:11) secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik, kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto, 2011:10). Kebijakan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesensaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Karakter atau nuansa publik dalam definisi ini menunjukkan pada tindakan kolektif, yakni menghimpunan dan pengelolaan sumberdaya berdasarkan prinsip gotong royong dan kebersamaan, yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, non pemerintah, maupun kombinasi dari kedua sektor tersebut (Suharto, 2009: 42).

Freeman dan Sherrwood dalam Suharto (2008:78) mengembangkan proses pengembangan kebijakan sosial (*social-policy development process model*) yang mengkesmas proses pembuatan kebijakan dalam tiga tahap. Yaitu Identifikasi, Implementasi dan Evaluasi. Tahap identifikasi terdiri dari beberapa langkah-langkah di dalalamnya seperti identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis masalah dan kebutuhan, penginformasian rencana kebijakan, perumusan tujuan kebijakan, pemilihan model kebijakan, penentuan indikator sosial, membangun dukungan dan legitimasi publik. Implementasi yaitu mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan program untuk dilaksanakan kepada sasaran program, sedangkan tahap evaluasi terdapat dua proses yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini dirumuskan

kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya dan perumusan kebijakan baru.



Gambar 2.1 Model Segitiga Perumusan Kebijakan

(Sumber: Suharto 2008:78)

Berdasarkan penjelasan tersebut, Evaluasi dilakukan baik terhadap proses pelaksanaan maupun hasil implementasi kebijakan. Namun evaluasi Raskin ini hanya difokuskan pada proses pelaksanaan kebijakan/program saja dan sejauh mana program Raskin mengikuti garis atau aturan yang telah ditetapkan dalam *best practice standards* program.

Kebijakan publik mempunyai elemen penting dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensional, yaitu berupa perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan model kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai pelayanan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai macam resiko. Seperti yang dijelaskan Suharto (2009) Perlindungan Sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesensaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Tiga tujuan utama perlindungan sosial menurut Suharto, (2009:42) adalah untuk, mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesensaraan yang parah dan berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesensaraan dan ketidakamanan sosial-ekonomi, memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standart hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi.

2.3 Konsep Implementasi kebijakan

Konsep mengenai implementasi kebijakan terdiri dari beberapa penjelasan diantaranya mengenai pengertian implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan, sosialisasi implementasi kebijakan, faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan, dan pembahasan terakhir yaitu mengenai program bagian dari kebijakan.

2.3.1 Pengertian Implementasi kebijakan

Wahab (2004:65) memandang implementasi kebijakan sebagai *“those actions by publik or provide individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision”* (tindakan-tindakan yang oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Daniel Mazmanian dan Paul Subatier (dalam Agustino, 2014:139) memaparkan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Dari sebuah tahapan kebijakan, pelaksanaan (implementasi) merupakan tahapan yang penting untuk dideskripsikan. Dari implementasi kebijakan pada akhirnya dapat diketahui tingkat keberhasilan kebijakan yang bersangkutan. “rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi”. (Nugroho, 2006:119).

Pendapat yang senada diungkapkan oleh Chief J dalam Agustino (2011:140) dengan mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian dan rencana jika tidak diimplementasikan. Dari berbagai keterangan di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui implementasi, proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi terkait keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Sedangkan pengendalian implementasi tersebut bisa dijabarkan melalui langkah monitoring dan evaluasi. Menurut Marjuki dan Suharto (Suharto, 2010:164). Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan Evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksanakan, apa sebabnya berhasil dan apa sebabnya gagal. Kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan atas hasil dari monitoring. Monitoring dan Evaluasi berfungsi tidak saja untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.

Menurut Agustino (2011:157) ada beberapa faktor penentu dilaksanakannya suatu Program. yaitu:

- a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintahan
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya sanksi hukum.
- d. Adanya kepentingan Publik.
- e. Adanya kepentingan pribadi.
- f. Masalah waktu.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan

Dalam memahami model-model implementasi, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2011:108) yaitu *top down* dan *bottom up*. Dimana dalam bahasa Lester dan Stewart istilah itu

dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antar kebijakan dan hasilnya.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang bersifat *top down* yang berisi prosedur-prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh pembuat kebijakan dan harus dilaksanakan oleh administrator dibawahnya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan, yaitu memperbaiki permasalahan pangan.

Tahap implementasi kebijakan menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) melalui enam langkah sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan pengkajian program untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

2. Pengembangan kontak dengan komunitas

Tahap ini sebagai upaya pengembangan relasi dengan komunitas yang lebih bermakna. Pengembangan kontak yang baik dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian tujuan program.

3. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi mengenai pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dan menggambarkan subjek pembahasan.

4. Perencanaan dan analisis

Menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan dibahas dan melakukan perencanaan dalam memilih tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memfokuskan pada suatu masalah tertentu.

5. Pelaksanaan

Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program.

6. Evaluasi

Dengan evaluasi maka suatu program atau suatu kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuan program yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.

7. Terminasi

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri.

Sebagai sebuah bagian dari kebijakan, program Raskin juga melalui beberapa tahap seperti yang telah dijelaskan diatas untuk mengimplementasikannya. Penelitian ini difokuskan pada sejauh mana para pelaksana Raskin Desa Sruti melaksanakan setiap rangkaian program yang telah ditetapkan oleh program Raskin sehingga program Raskin benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.3.3 Sosialisasi Implementasi Kebijakan

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2004) menjelaskan bahwa untuk melakukan sosialisasi implementasi kebijakan, diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan yaitu kondisi eksternal tidak menimbulkan masalah baru, artinya pihak luar tidak memunculkan masalah.
- b. Tersedianya sumber daya yang memadai, sumber daya manusia yang handal dan sumber daya buatan yang produktif.
- c. Pengadaan sumber daya yaitu kesiapan persediaan sumber daya yang sewaktu-waktu diperlukan.
- d. Hubungan kausal yang handal antar elemen.
- e. Seberapa banyak hubungan kausal yaitu tingkat signifikan.
- f. Saling ketergantungannya kecil, artinya dapat berdiri kokoh dengan kekuatan sendiri agar efektif.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan, artinya ada peran yang dimainkan antara lembaga terkait untuk saling mendukung.
- h. Mengklasifikasi masalah, merinci masalah yang harus didahulukan.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Implentor yang berwibawa dan berpengaruh.

2.3.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2014:149) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan akan berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
 - a. Transmisi: penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
 - b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan pada

tataran tertentu dapat menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi; karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Edward dalam Winarno (2012:181) menawarkan cara untuk mengurangi ketidakjelasan komunikasi maka dibutuhkan saluran-saluran komunikasi yang efektif, dengan cara mengandalkan pejabat-pejabat dibawah untuk meneruskan dan melaksanakan keputusan dan perintah-perintah mereka. Semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

2. Sumberdaya, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen. Yaitu:
 - a. *Staf*, diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan dan tugas yang diinginkan oleh kebijakan.
 - b. *Informasi*, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, pelaksana-pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakuakn dan bagaimana mereka harus melakukannya, dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Informasi-informasi mengenai program-program sangat penting terutama bagi kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan teknis, dan bagaimana melaksanakan kebijakan yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang banyak, dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. *Wewenang*, kewenangan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. *Fasilitas*, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang juga penting dalam pendekatan

mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:168) mengidentifikasi tanggapan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: *pertama*, kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan *Kedua*, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. *Ketiga*, intensitas tanggapan itu. Intensitas kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menantang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah: a. *Pengangkatan Birokrat*, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih lagi kepada kepentingan warga. b. *Insentif*, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III, ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik. Yaitu yang pertama, melakukan *Standart Operating Prosedures* (SOPs) yaitu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan pada tiap harinya sesuai standart yang telah ditetapkan. dan yang kedua *Fragmentasi*, yaitu penyebaran tanggung jawab tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Menurut Sunggono (1994:149-159), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan, yaitu:

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum namun eksteren dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasian tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini, berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2.3.5 Program Bagian dari Kebijakan

Pembahasan mengenai implementasi tidak terlepas dari konsep program, karena program merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirawan (2011:17) bahwa program adalah aktivitas atau kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas, kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Nugroho (2006:141) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik. Sebagaimana Program Raskin yang merupakan salah satu bentuk realisasi dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam hal ini konsep tentang implementasi kebijakan dan implementasi program di pakai dalam artian yang sama, konsep mengenai implementasi kebijakan dipakai dalam menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 di Desa Sruni.

2.4 Program Beras Untuk Keluarga Miskin

Evaluasi yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011:7) Agar dapat melaksanakan evaluasi dengan baik, para evaluator perlu memahami program yang akan dievaluasinya secara rinci, mereka perlu mempelajari program dan menyusun teori program. Teori program memfokuskan pada apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang ideal dalam melaksanakan program, bagian dari teori ini memberikan pedoman dengan memberi tahu para praktisi dalam melaksanakan program dengan cara terbaik (Wirawan, 2011:69). Dalam hal ini, peneliti menggunakan pedoman pelaksanaan Raskin sebagai teori program yang sekaligus indikator program dalam rencana evaluasi yang akan dilakukan, sehingga menuntun pelaksanaan program agar terlaksana dengan baik.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan

kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2014 (Pedum Raskin 2014). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan. Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut: *Pertama*, stabilisasi harga beras dipasaran. *Kedua*, pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional. *Ketiga*, peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, peningkatan akses pangan baik secara fisik beras tersedia di titik distribusi (TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. *Kelima*, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, dan. *Ketujuh*, membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

A. Pedoman Pelaksanaan Program Raskin 2014

1. Pedoman Umum Raskin Program Raskin 2014

Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional. Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

2. Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2014

Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman

dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

3. Petunjuk Teknis Program Raskin 2014

Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

B. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya. Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat dan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR), dan menyelesaikan administrasi. Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi: Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan

Raskin dari Perum Bulog di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis). Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di titik bagi (TB). Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.

Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD. Terakhir, membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke tim koordinasi Raskin kabupaten/kota melalui tim koordinasi Raskin kecamatan.

C. Mekanisme Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin 2014, yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu: Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTSPM Raskin 2014 dengan menetapkan RumahTangga

yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Kemudian, Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak

pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.

D. Penetapan Titik Bagi (TB)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat. Sedangkan TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

E. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin

1. Sosialisasi Program Raskin

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah. Peluncuran program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

2. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) Hingga ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD. Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM

sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

3. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

F. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

G. Pelaporan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap triwulan. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim

Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

Sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sasaran dan meningkatkan akses pangan masyarakat miskin melalui penjualan beras, maka keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T. Yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi (TNP2K, 2011).

2.5 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberi landasan dan acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran dari sebuah penelitian. Penelitian memerlukan informasi pendukung yang dapat dilakukan melalui telaah kepustakaan yang termasuk didalamnya adalah tinjauan penelitian terdahulu. Adanya tinjauan penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan. penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan rujukan berfikir secara teoritik bagi penelitian ini, meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, dan pembahasannya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan adalah penelitian Zulfa Emalia (2013) yaitu tentang analisis efektivitas pelaksanaan program Raskin di kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Raskin di 3 kecamatan di Kota Bandar Lampung tepat pada seluruh aspek penilaian, kecuali pada ketepatan jumlah, dikarenakan adanya pemberian penambahan Raskin yakni mulanya sebesar 13Kg/RTM menjadi 15Kg/RTM.

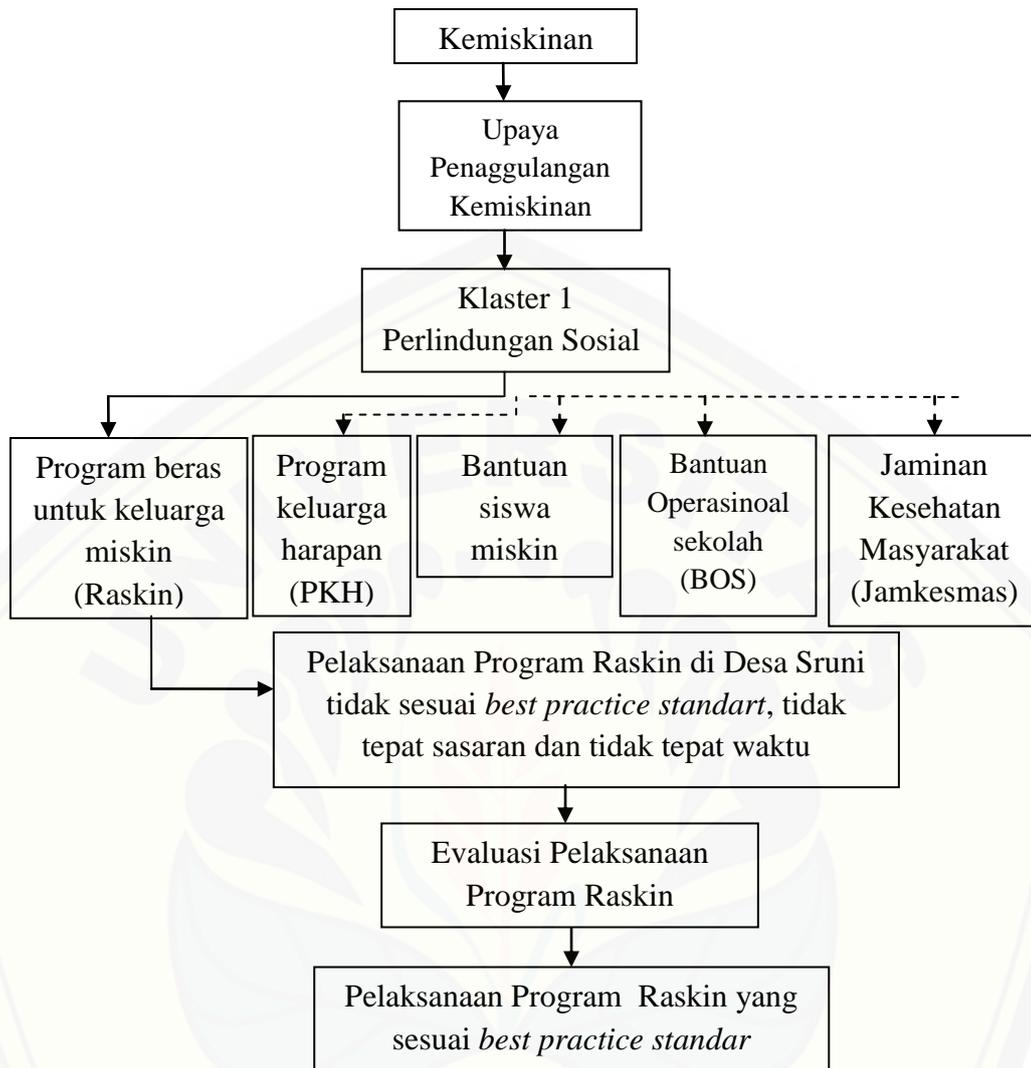
Penelitian lainnya tentang Evaluasi program Raskin di kota Semarang yang dilakukan oleh Yossi Herma Panjaya (2011). Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan deskriptif persentase untuk variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk ketepatan sasaran Program Raskin dalam kriteria baik karena kualitas beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul merasa puas dengan kualitas beras yang dibagikan. Untuk tingkat efektivitas Program Raskin termasuk dalam kriteria baik alasannya jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 kg per Rumah Tangga Miskin per bulan. Sedangkan Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan. Dan untuk kendala-kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Pedurungan Kidul adalah pembayaran beras oleh Rumah Tangga Miskin yang terkadang kurang tertib dan tepat waktu. Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatien Hamamah (2014) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Melalui Mekanisme Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (Sudy Kasun Sekolah Menengah Tingkat VII Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Pelaksanaan Program BSM melalui mekanisme kartu calon penerima BSM di Kecamatan Rumpin capainnya belum optimal. Karena dari total alokasi kuota yang telah ditetapkan sebesar 375 ARTS (anak rumah tangga sasaran) untuk Kecamatan Rumpin tidak ada hasil rekapitulasi sekolah yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lalu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal pendistribusian kartu calon penerima manfaat capaian kinerja lembaga penyalur (PT. Pos Indonesia) cukup bagus. Sedangkan Kendala yang dihadapi

adalah waktu penerimaan kartu, pencairan dan penyaluran tidak serentak, dan kurangnya sosialisasi. Keunggulan dari mekanisme ini adalah data yang dijamin pada target rumah tangga sarsana dapat lebih objektif daripada mekanisme usulan sekolah (FUS). Agar lebih mudah dalam memahami ketiga penelitian terdahulu tersebut, peneliti menyajikan dalam tabel sistematis di lampiran I.

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi tentang proses pelaksanaan program Raskin serta tugas para implementator program Raskin selama pelaksanaan program dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat, sehingga program Raskin tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan menjadi tujuan dari program.

2.6 Alur Penelitian

Pada sebuah penelitian kerangka berfikir dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Alur penelitian juga menjelaskan arah penelitian sehingga nantinya dapat tergambar tujuan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Alur pikir penelitian mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program Raskin untuk keluarga miskin Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Berikut adalah gambar alur penelitian berdasarkan judul penelitian.



Keterangan:

———— Alur pembahasan penelitian

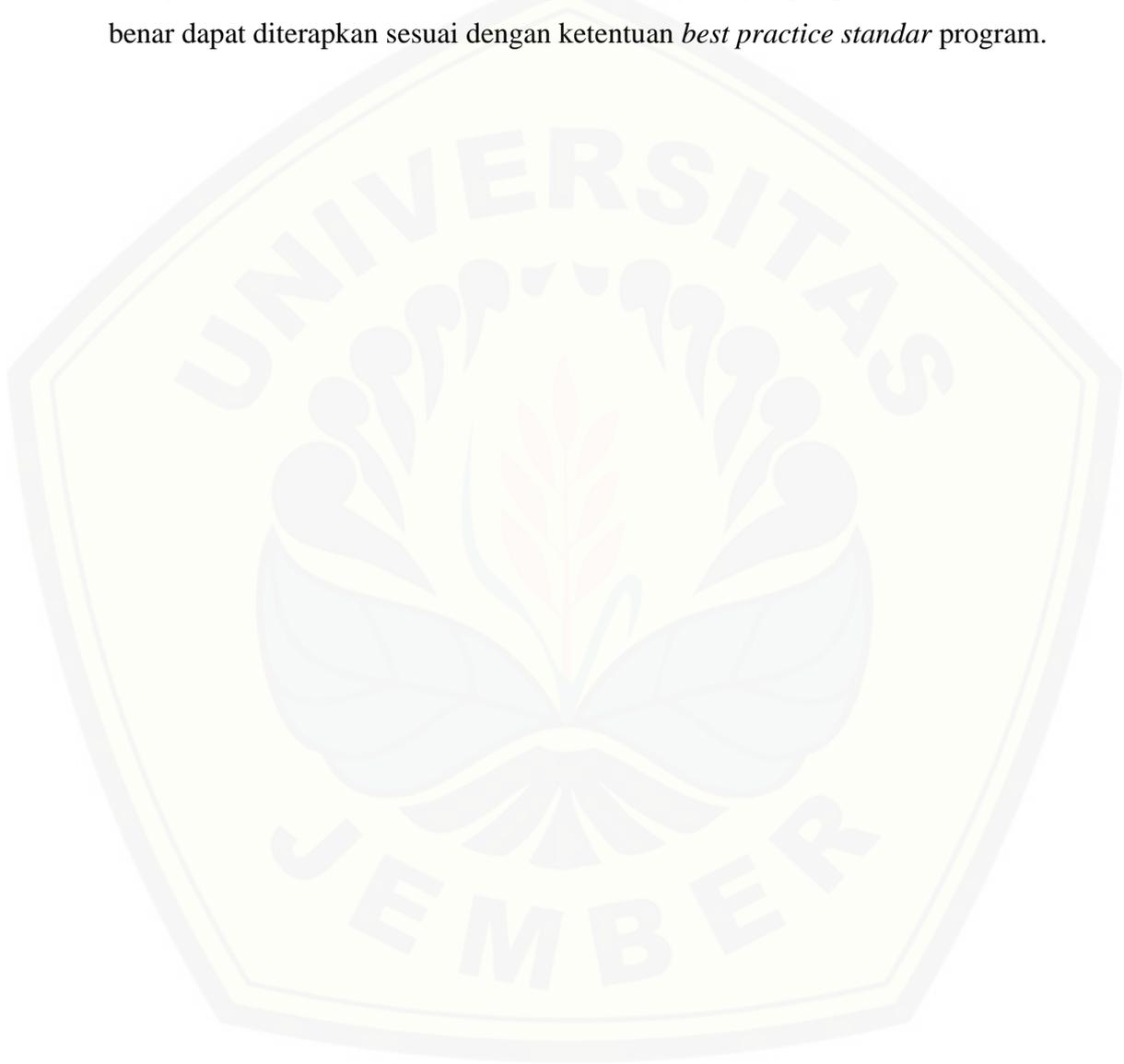
----- Tidak masuk dalam alur pembahasan penelitian

Gambar 3.1 Alur Fikir Penelitian

(Sumber: diolah peneliti 2015)

Usaha pemerintah dalam merespon tingginya angka penduduk miskin di Indonesia kemudian direalisasikan dalam bentuk upaya penanggulangan kemiskinan dengan dibentuknya Tim nasional percepatan Penanggulangan kemiskinan sebagai penanggung jawab penuh atas upaya dan program-program di dalamnya. Program-program tersebut terbagi atas empat Klaster, dalam Klaster I

terdapat bantuan Subsidi Beras untuk Keluarga Miskin yang juga penting karena peran komoditi makanan mempunyai peran utama dalam meningkatkan penguatan ketahanan pangan nasional terutama untuk keluarga miskin. Dalam upaya memperbaiki ketidaktepatan dalam pelaksanaan program Raskin tersebut perlu adanya evaluasi mendalam terkait pelaksanaannya, agar program tersebut benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan *best practice standar* program.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, penting untuk menentukan metode yang tepat untuk menentukan dan menjelaskan generalisasi fenomena yang meliputi masalah penelitian. Roebandi (2008:50) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah metode yang akan digunakan untuk memahami, mempelajari dan merencanakan secara sistematis mengenai cara yang tepat untuk menggambarkan materi yang akan diteliti.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:1). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari kata-kata orang dan perilaku orang yang dapat diamati. Sedangkan menurut Patton (dalam Wirawan, 2011:154) data kualitatif terdiri dari deskripsi rinci mengenai situasi, kejadian-kejadian, interaksi-interaksi, dan perilaku-perilaku terobservasi; kutipan-kutipan langsung mengenai pengalaman mereka, sikap, kepercayaan, dan pikiran; kutipan atau keseluruhan dari dokumen-dokumen, koresponden, rekaman, rekaman dan kasus-kasus sejarah. Dengan informasi dari informanlah inilah yang kemudian diamati, ditafsirkan dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran secara detail tentang pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin Raskin di Desa Sruni tahun 2014.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif. Menurut Patton (2002:215-220), jenis penelitian ada empat yaitu *Basic Research, Applied Research, Evaluation Research and Action-Oriented, Problem-Solving Research*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Evaluation Research* dimana menurut Patton, (*Evaluation research can be conducted on virtually any explicit attempt to solve problems or bring about planned*)” penelitian evaluasi dapat dilakukan pada hampir setiap upaya eksplisit dalam memecahkan masalah atau mengarahkan rencana yang telah ditetapkan.

Evaluasi tidak hanya memerlukan data atau informasi mengenai hasil akhir program, tetapi proses dari implementasi program serta kerta kejadian-kejadian dan penyebab kejadian tersebut. Menurut Wirawan (2009:139), evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya pada standar evaluasi. Hasilnya berupa informasi mengenai objek evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk menilai apakah program, proyek atau kebijakan yang disusun telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak, kemudian akan ditetapkan apakah program, proyek atau kebijakan akan diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Sedangkan menurut Patton (2002:147) *Program evaluation was originally focus on measuring attainment of goals and objective, that is, finding out if a program “work”, that is, if it’s effective*”. Evaluasi program pada dasarnya fokus pada pengukuran pencapaian dari tujuan dan sasaran program, yaitu dengan mencari tahu jika program bekerja/berhasil itu artinya program tersebut efektif. Penelitian evaluatif tentang pelaksanaan program Raskin 2014 di Desa Sruni dilakukn dengan cara mengumpulkan objek evaluasi kemudian membandingkannya dengan standar evaluasi.

Jenis evaluasi dalam penelitian ini merupakan jenis evaluasi formatif. *The Program Evaluation Standards* (Dalam Wirawan 2011:86) mendefinisikan evaluasi formatif sebagai evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Sedangkan menurut Royse dan Thyer (dalam Lewis, Lewis, Packard, & Souflee, 2001:246)

mendefinisikan evaluasi formatif sebagai “(a type of process evaluation intended to adjust and enhance interventions...to provide feedback and onfluence a program’s ongoing development)” sebuah tipe evaluasi proses yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dan memperbaiki intervensi...untuk menyediakan umpan balik dan pengaruh terhadap perkembangan sebuah program yang sedang berjalan.

Menurut Wirawan (2011:87-89) evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodik, evaluasi mengukur target tersebut telah dicapai sesuai waktu yang telah ditetapkan atau tidak, jika target waktu gagal maka akan menghambat pelaksanaan pekerjaan termin berikutnya.
- b. Untuk mengukur apakah klien/partisipan bergerak kearah tujuan yang direncanakan, program atau proyek memeberikan layanan kepada klien atau pemangku kepentingan. Layanan tersebut perlu dikukur kuantitas dan kualitasnya pada waktu tertentu secara periodik. Jika kuantitas dan kualitasnya tidak memenuhi target, perlu diketahui hambatan apa yang dihadapi untuk mencapai target dan koreksi apa yang harus dilakukan.
- c. Untuk mengukur apakah sumber-sumber telah digunakan sesuai rencana;
- d. Untuk menentukan koreksi apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi penyimpangan, evaluasi formatif harus menentukan berapa besar penyimpangan terjadi;
- e. Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan ketika terjadi penyimpangan, yaitu penyimpangan positif ataukah penyimpangan negatif. Penyimpangan positif terjadi jika target terlampaui artinya target program dilaksanakan lebih cepat dari yang direncanakan akan tetapi kualitasnya memenuhi standar dan target sumber-sumber lebih kecil daripada yang ditentukan. Sedangkan penyimpangan negatif mengharuskan adanya koreksi misalnya dilakukan audit kegiatan dan penggunaan anggaran.

- f. Memberikan balikan, evaluasi formatif merupakan bagian integral dari proses pengembangan pelaksanaan prgram. Evaluasi ini memberikan balikan secara terus-menerus untuk memperbaiki perencanaan, standar prosedur operasi, penggunaan sumber-sumber, dan perkembangan pelaksanaan program.

3.3 Model Evaluasi

Model evaluasi merupakan hal terpenting dalam penelitian evaluasi. model evaluasi merupakan bagian dari desain evaluasi, dimana desain evaluasi terdiri dari model evaluasi dan metode penelitian. Model evaluasi menentukan jenis evaluasi apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana proses melaksanakan evaluasi tersebut (Wirawan, 2011:147). Penelitian ini menggunakan model evaluasi ketimpangan atau diskrepansi (*The Discrepancy Evaluation Model*), model ini menggambarkan ketimpangan antara standar kinerja dengan kinerja yang terjadi. Ketimpangan-ketimpangan ditentukan melalui mempelajari tiga aspek dari program, yaitu masukan (*input*), proses (*process*) dan keluaran (*output*) pada tingkat-tingkat pengembangan program. Namun dalam penelitian evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Desa Sruni ini hanya difokuskan pada aspek proses pelaksanaan program.

Evaluasi proses pelaksanaan menurut Pietrzak (1009:111) yaitu “*A process evaluation on program activities that involve direct interactions between clients and line staff and are central to the accomplishment of the program’s objectives. This type of evaluations begins with an analysis requires identifying the program parameters and the major components there in*”. “Proses evaluasi pada aktifitas program dapat mengarah langsung pada interaksi antara penerima manfaat dan staff program dan ini penting untuk pencapaian tujuan dari program. Jenis dari evaluasi ini dimulai dengan mengidentifikasi parameter program beserta komponen utama di dalamnya yang kemudian di analisa.

Dalam pelaksanaan program Raskin tahun 2014 di Desa Sruni, evaluasi terhadap pelaksanaan sangat penting karena untuk memastikan apakah program sudah jalankan sesuai dengan perencanaan dapat dilihat dari proses pelaksanaan

Program Raskin di Desa tersebut dengan cara mengidentifikasi dan membandingkannya dengan parameter atau standar program.

Menurut Patton (1990), dalam melakukan evaluasi dapat menggunakan *Best Practice Standarts* untuk menentukan standart dan kriteria evaluasi. *Best practice standarts* merupakan akumulasi standart yang berlaku mengenai tahapan dan/atau strategi pelaksanaan suatu program yang dapat dijadikan pedoman untuk performa program (Pietrza, Ramler, Ranner, Ford, & Gilbert, 1990:56). Namun tidak semua lembaga secara keseluruhan berpatokan pada *best practice standarts* yang ada, lembaga-lembaga umumnya melakukan penyesuaian untuk mencocokkan standart tersebut dengan kondisi dan sumber daya yang ada di lapangan. Seperti yang dijelaskan Pietrza, Ramler, Ranner, Ford, & Gilbert (1990:56) standart yang ada tidak dapat dipastikan bisa diaplikasikan seutuhnya ke dalam program, karena diperlukan biaya yang besar untuk mengimplementasikan standarts tersebut secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan *best practice standarts* dalam menentukan standart dan kriteria evaluasi.

The Joint Committe on Standart For Educational evaluations (dalam Wirawan, 2011:278) menjelaskan standart evaluasi ke dalam dua definisi. Pertama, standart adalah suatu prinsip yang disepakati oleh orang-orang yang berkecimpung dalam praktik profesioanal. Standart berisi prinsip-prinsip dan norma-norma umum yang disepakati oleh para profesioanal yaitu mereka yang berkecimpung dalam praktek evaluasi. Kedua, standar evaluasi merupakan standar kualitas, yaitu standar untuk mengukur hasil evaluasi dari kualitas rendah sampai kualitas tinggi dan dari tidak layak sampai layak. Jika standar dipenuhi atau dipergunakan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi, maka hasil evaluasi tinggi kualitasnya dan layak. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat diterima, bermanfaat, dan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan evaluasi misalnya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijak.

3.4 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan terkait

permasalahan pada fokus penelitian. Pertimbangan tersebut adalah di desa ini terdapat fenomena penyelenggaraan program Raskin yaitu sebagian beras Raskin dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara bergantian dengan RTS-PM lainnya setiap kali alokasi, seharusnya program dari pemerintah ini serentak secara nasional dibagikan kepada setiap RTS-PM setiap bulan/alokasi, RTS-PM berhak memperoleh Raskin setiap bulan/alokasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana program dengan implementasinya setelah dilapangan. Berdasarkan observasi awal tersebut, peneliti menentukan Desa Sruni sebagai lokasi penelitian, namun ketika observasi dilanjutkan ke Desa Jatimulyo dan Desa Cangkring, dimana Desa Jatimulyo merupakan desa dengan jumlah RTS-PM Raskin paling sedikit di kecamatan Jenggawah, dan Desa Cangkring merupakan desa dengan jumlah penerima Raskin terbanyak di Kecamatan Jenggawah, peneliti tidak menemukan fenomena penyelenggaraan Raskin yang demikian dilokasi tersebut. Berdasarkan fenomena dan pertimbangan tersebut, sehingga menarik peneliti untuk meneliti tentang evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang-orang yang dianggap mengetahui dan memiliki informasi terkait hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Moleong (2007:132) menyatakan bahwa “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kedudukan informan sangat penting dalam proses penelitian kualitatif karna informan merupakan orang mengetahui persis mengenai peristiwa dilapangan dan informan bisa menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam teknik penentuan informan. Menurut Sugiono (2005:54) teknik purposif adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tertentu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial.

Purposive sampling dalam penelitian ini digunakan dalam menentukan informan. Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi informan pokok dan informan tambahan. Informan sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan asumsi bahwa sampel ini memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat menambah data penelitian.

Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:172) informan pokok adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Menurut Sugiono (1997:47) informan kunci sebagai informan pokok harus memenuhi empat kriteria yang saling bertautan yaitu:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan;
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif pada kegiatan yang menjadi sasaran dan perhatian peneliti;
3. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi;
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai implementasi program Raskin yang dilaksanakan di Desa Sruni, untuk itu diperlukan informan pokok yang benar-benar mengetahui dan memahami implementasi program Raskin di Desa Sruni. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menentukan kriteria informan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksana program Raskin pada tahun 2014 yang telah berpengalaman menjadi tim atau bagian dari pelaksana program.
2. Mengetahui dan terlibat langsung dalam implementasi Program Raskin.
3. Bersedia untuk menjadi informan.

Berdasarkan pemaparan kriteria informan yang disebutkan diatas, maka informan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Aparat pemerintahan Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang terdiri atas, Kepala dusun, Kaur bagian Kesra, dan ketua RT.
2. Penanggung jawab program Raskin yaitu Kepala Desa Sruni

Berdasarkan karakteristik informan pokok yang telah ditentukan ditentukan, maka informan yang sesuai dengan kategori tersebut ada 14 orang yang terdiri dari pelaksana program Raskin 2014. Seperti tabel dibawah ini.

Tabel : 3.1 Profil Informan Pokok

No	Nama	JK	Pekerjaan	Kedudukan	Lama menjabat
1	NK	L	Perangkat	Kepala Desa	2 Periode
2	FR	L	Perangkat	Kaur Bag. Kesra Desa	3 Tahun
3	SY	L	Perangkat	Kepala Dsn. Leces	4 Tahun
4	KY	L	Tani	Ketua RT03/06 Leces	30 Tahun
5	MK	L	Tani	Ketua RT06/05Leces	40 Tahun
6	IS	L	Perangkat	Kepala Dsn. Krajan	2 Tahun
7	KS	L	Tani	Ketua RT 03/ 02 Krajan	42 Tahun
8	PD	L	Tani	Ketua RT 02/01 Krajan	13 Tahun
9	JM	L	Perangkat	Kepala Dsn. K. Kokap	8 Tahun
10	MR	L	Tani	Ketua RT01/02 K. kokap	23 Tahun
11	AS	L	Tani	Ketua RT1/03 K. Kokap	25 Tahun
12	JN	L	Perangkat	Kepala Dsn Darungan	5 Tahun
13	SR	L	Tani	Ketua RT04/07 Darungan	9 Tahun
14	SH	L	Tani	Ketua RT01/07 Darungan	5 tahun

Sumber: diolah penulis 2015

Informan tambahan menurut Suyanto dan Sutinah (2005:172) adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah orang yang dianggap tahu tentang apa yang terjadi dan masih berhubungan dengan data pokok penelitian. Informan tambahan dibutuhkan untuk pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari informan pokok. Informan tambahan dalam penelitian ini diambil dari penerima manfaat program Raskin dengan kriteria:

1. Informan merupakan orang yang mengetahui tentang pelaksanaan Raskin Tahun 2014 di Kecamatan Jenggawah.
2. Informan merupakan penerima manfaat program di Desa Sruni;

3. Informan tersebut telah menerima manfaat program selama minimal tiga tahun;
4. Bersedia menjadi informan.

Berdasarkan karakteristik informan tambahan yang telah ditentukan, maka informan yang sesuai dengan kategori tersebut diperoleh 4 orang yang terdiri dari satu pelaksana Raskin Kecamatan Jenggawah tahun 2014 dan tiga informan penerima program Raskin 2014. Seperti tabel dibawah ini.

Tabel : 3.2 Profil Informan Tambahan

No	Nama	JK	Pekerjaan	Kedudukan	Lama menjabat/ Menerima
1.	ER	P	Staf Kecamatan	Bag. Kessos Kec.Jenggawah	15 Tahun
2.	RH	P	IRT	Warga RT 03/RW 01 Krajan	10 Tahun
3.	SM	P	IRT	Warga RT 07 RW 05 Leces	5 Tahun
4.	EV	P	IRT	Warga RT 03 RW 02 Krajan	11 Tahun

Sumber: diolah penulis 2015

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk menghimpun data yang kemudian dari data-data tersebut akan dicari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam proses penelitian karna akan berpengaruh terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik pengumpulam data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subyek penelitian (Burns dalam Basrowi, 2008:93). Observasi menurut Pincus dan Minahan

(1973:125) adalah: “ *Is a pervasive activity and a basic of gathering information in daily life. They are important differences between casual observations and the use observations as atool in data collection. Observation can be considered a technique to extent thet it is use toward some specific purpose*” (adalah aktifitas yang dapat menembus dan sebuah dasar mengumpulkan informasi di kehidupan sehari-hari. Terdapat perbedaan antara observasi kasual dan penggunaan observasi sebagai alat dalam pengumpulan data. observasi dikatakan sebagai teknik, apabila digunakan dalam tujuan yang spesifik). Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, observasi dilakukan untuk memperoleh lebih banyak keterangan dari masalah yang akan diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni. Penelitian ini dilakukan melalui observasi nonpartisipan dimana penulis tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut dengan memanfaatkan dokumen yang ada. Menurut Faisal (1990:78), observasi *nonpartisipan* adalah sekedar melakukan observasi, tetap berdiri sebagai orang luar dalam situasi sosial yang tengah diobservasi. Observasi dengan sengaja dilakukan pada saat informan senggang atau dalam keadaan santai tanpa tekanan yaitu pada waktu informan istirahat atau selesai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan pekerjaan masing-masing informan.

Menurut Faisal (1990:78), terdapat sembilan *item* utama yang dapat diobservasi pada situasi sosial, yaitu:

1. Menggambarkan keadaan tempat dan ruang tempat situasi sosial yang berlangsung dengan mencatatanya pada catatan lapangan contohnya saat mengikuti pelaksanaan Program Raskin.
2. Mencatat benda, peralatan, perlengkapan yang terdapat pada ruangan tersebut termasuk tata ruang dan penggunaanya misalnya perabotan rumah, meja kursi dan tempat berlangsungnya observasi.
3. Mencatat para pelaku pada suatu situasi tersebut, termasuk karakteristik yang melekat pada mereka seperti, status, jenis kelamin, dan usia misalnya pada pelaksana dan penerima manfaat program Raskin.

4. Mencatat kegiatan yang sedang berlangsung pada saat observasi namun sifatnya tersamar agar informan tidak merasa risih dan tetap bersifat normal.
5. Tingkah laku para pelaku dalam proses berlangsungnya aktivitas/kegiatan yang berhubungan juga tidak luput untuk dicatat.
6. Peristiwa yang berlangsung saat dilakukannya observasi.
7. Waktu berlangsungnya peristiwa, pagi siang sore atau malam.
8. Ekspresi perasaan yang tampak pada para pelaku disituasi sosial misalnya marah, takut, gelisah, sedih, senang dan lain-lain.
9. Tujuan yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan yang ada disuatu situasi sosial.

Dalam penelitian ini, observasi berfokus pada situasi sosial yang terjadi dalam berbagai kegiatan masing-masing informan. Secara umum dijelaskan sebagai berikut:

a. Informan NK

Berdasarkan observasi yang dilakukan diruang kerja Kades NK di Balai Desa Sruni. Informan NK berusia 60 tahun. Diruangan tersebut terlihat banyak perlengkapan yang ada didalamnya, diantaranya adalah seperangkat meja dan kursi kerja, satu set sofa dengan vas bunga diatas meja, satu lemari yang berisi tumpukan kertas dan papan skema pemerintahan yang menggantung didinding. Pada saat dikunjungi informan dalam keadaan santai bersama dengan perangkat desa diruang kerja para perangkat Desa, namun karena dirasa suasana terlalu bising, maka dengan senang hati informan NK mempersilahkan penulis untuk berbincang-bincang di ruang Kepala Desa. Informan terlihat santai dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan peneliti, namun binforman terkesan begitu berwibawa.

b. Informan FR

Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada FR di Kantor balai Desa Sruni tepatnya diruangan para perangkat Desa. Informan FR berusia 21 Tahun bekerja sebagai Kaur Bagian Kesejahteraan Rakyat di Desa Sruni. Di dalam ruangan terlihat beberapa set meja dan kursi kerja untuk perangkat Desa Sruni, tidak jauh berbeda dengan meja kerja perangkat lainnya, di Meja FR terdapat

tempat arsip dan beberapa tumpukan kertas, serta dibelakang kursi FR terdapat papan bekas skema pemerintahan yang sudah tidak terpakai Pada saat observasi suasana kantor tidak begitu ramai. dalam ruangan tersebut ada dua perangkat lainnya yang sedang sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Saat penelitian informan dalam keadaan santai.

c. Informan JN

Observasi dilakukan dirumah JN. informan berumur 47 tahun dan selam 5 tahun terakhir menjabat sebagai Kepala Dusun Darungan. Di ruang tamu JN terdapat dua set sofa, satu pot bunga sintetis yang besar dan terlihat beberapa hiasan dinding dan satu lemari kaca dengan terdapat televisi dibagian tengah, dan berisi beberapa alat-alat dapur yang tepat berada dibelakang sofa. Pada saat penelitian, siang itu informan dalam keadaan santai dengan putrinya namun informan dengan antusias menyambut kedatangan dan berbincang-bincang dengan peneliti.

d. Informan SR

Observasi dilakukan dirumah informan SR, infoman berusia 55 tahun, dan telah menjadi RT selama 30 tahun. Saat di rumah informan, hanya ada satu set kursi dan satu lemari kaca yang diruang tamu informan, dan lantai umah SR merupakan lantai yang terbuat dari semen. Saat dikunjungi informan dalam keadaan santai. Siang itu didepan rumah SR terdapat beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang berkumpul didepan rumah informan.

e. Informan SH

Berdasarkan observasi yang dilakukan di rumah informan. Informan SH berusia 48 tahun, Ketua RT 01 RW 07 Dusun Darungan selama 5 tahun terakhir. Rumah informan terlihat seperti bangunan yang masih baru, lantai rumah SH merupakan lantai yang terbuat dari semen sehingga lantai terlihat berwarna hitam, di ruang tamu hanya terdapat satu set sofa berwarna hijau. Saat dikunjungi, siang itu SH dalam keadaan santai duduk didepan dapur, dan informan dengan serius menceritakan tentang pelaksanaan Program Raskin di Desa Sruni.

f. Informan JM

Berdasarkan observasi yang dilakukan di rumah informan JM di Dusun Karang Kokap. Informan JM berusia 45 tahun dan merupakan Kepala Dusun Karang Kokap yang telah menjabat selama 8 tahun. Perlengkapan yang ada di ruang tamu informan terdapat dua set kursi satu sound sistem, akuarium, dan beberapa hiasan dinding. Saat dikunjungi JM sedang bersantai dan baru saja selesai menyiram halaman. Informan tampak bersemangat menceritakan pelaksanaan program Raskin. Observasi dilakukan pada sore hari.

g. Informan MR

Berdasarkan observasi yang dilakukan di rumah informan MR. Informan berusia 45 tahun dan merupakan Ketua RT 03 RW 03 Dusun Karang Kokap semenjak 23 tahun yang lalu. Saat penelitian, terlihat di ruang tamu informan hanya terdapat satu set kursi plastik dan meja sedangkan lantai rumah informan terbuat dari semen, tidak ada hiasan dinding, dan terlihat dari ruang tamu yang merupakan ruang yang terbuka terdapat banyak alat-alat bengkel yang informan gunakan setiap hari untuk bekerja. Saat dikunjungi informan sedang bersantai dengan istrinya, terlihat saat bercerita tentang pelaksanaan Program Raskin, informan nampak bersemangat.

h. Informan AS

Observasi pada informan AS dilakukan di rumah informan yaitu di RT 01 RW 03 Karang Kokap, informan berusia 58 tahun dan merupakan Ketua RT sejak 25 tahun yang lalu. Selain menjadi ketua RT, pekerjaan informan setiap hari adalah bertani, dan saat wawancara informan baru saja pulang dari sawah. Terlihat di ruang tamu informan terdapat satu set kursi berwarna coklat, dibelakang kursi terdapat ruang keluarga dengan televisi yang diletakkan di meja. Beberapa hiasan dinding yang terdiri dari foto cucu informan dan pernikahan anak informan serta kalender, selain itu terdapat puluhan balon mainan anak-anak yang siap dijual oleh anak informan. Saat dikunjungi, informan sedang bersantai dengan istrinya, dan informan tampak ramah dan bersemangat menceritakan seputar pelaksanaan program Raskin.

i. Informan IS

Observasi pada informan dilakukan di halaman Kantor Balai Desa Sruni. Informan berusia 39 tahun dan merupakan kepala Dusun Krajan selama satu tahun. Saat di temui, suasana halaman kantor Desa sedang tidak begitu ramai, dan informan sedang menunggu para RT dari Dusun Krajan untuk menjemput beras jatah Raskin dengan beberapa tumpukan karung beras Raskin di samping informan. Kasun yang lain yang juga menunggu Ketua RT berada tiak terlalu dekat dengan informan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan beras Saat pembicaraan tentang pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni, informan selalu tampak antusias. Observasi dilakukan pada siang hari.

j. Informan KS

Observasi pada informan dilakkan di rumah informan yaitu di Dusun Krajan. informan merupakan Ketua RT 03 RW 02 Dusun Krajan semenjak 42 tahun. Informan berusia 62 tahun dan pekerjaan sehari-sehari informan sebagai petani. Adapun perlengkapan yang terdapat dalam ruang tamu informan yaitu dua kursi anyaman yang panjang berwarna merah dan ditempatkan secara berhadap-hadapan, satu meja dengan asbak di atasnya. Satu kursi anyaman pendek berwarna biru, dan di sisi sebelah kiri ruang tamu terdapat dipan, lantai rumah informan terbuat dari semen, ruang tamu informan terdiri dari banyak jendela dengan kaca berwarna putih. Saat penelitian informan sedang bersantai bersama dengan anaknya. Informan tampak begitu lembut dalam bertutur kata namun tetap bersemangat menceritakan seputar pelaksanaan Raskin di Desa Sruni. Observasi dilakukan pada siang hari.

k. Informan PD

Observasi dilakukan di rumah informan di RT 02 RW 01 Dusun Krajan. informan berusia 62 tahun dan dipercaya menjadi Ketua RT oleh warganya selama 13 tahun, selain menjadi Ketua RT keseharian informan merupakan petani. Adapun perlengkapan yang ditemui di ruang tamu informan yaitu satu tikar hitam yang tidak begitu lebar, dan satu lemari kayu. Lantai rumah

informan terbuat dari semen. Saat dikunjungi informan sedang bersantai dengan tetangga, dan situasi di sekitar rumah informan tampak begitu ramai dengan para ibu-ibu dan anak-anak kecil, namun informan terlihat begitu ramah dan antusias ketika berbicara mengenai pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni. Observasi dilakukan pada siang hari.

l. Informan SY

Observasi dilakukan di pendopo kantor Balai Desa Sruni. Informan berusia 50 tahun dan merupakan Kepala Dusun Leces semenjak empat tahun yang lalu, selain itu setiap harinya, informan juga bertani. Pada saat penelitian, suasana di Kantor Desa sudah mulai sepi, karena perangkat desa yang lain sudah mulai pulang, terlihat di pendopo kantor Balai Desa Sruni terdapat satu set kursi ukiran dari kayu, sedangkan di bagian sudut pendopo terdapat puluhan bangku-bangku yang ditumpuk secara rapi, lantai pendopo berwarna putih. Informan tampak begitu serius, bersemangat, dan ekspresif dalam menyampaikan pandangannya dalam setiap pertanyaan yang dilontarkan peneliti seputar pelaksanaan program Raskin. Observasi dilakukan pada siang hari.

m. Informan KY

Observasi pada informan KY dilakukan di rumah informan yaitu di Ketua RT 03 RW 06 dusun Leces. Informan berusia 50 tahun dan merupakan ketua RT selama 30 tahun dan pekerjaan sehari-hari sebagai petani. Saat penelitian perlengkapan yang terdapat di ruang tamu informan antara lain satu set kursi, satu kursi plastik, kipas angin, satu lemari besar yang berfungsi sebagai pembatas ruang tamu dengan ruang keluarga, beberapa hiasan dinding seperti foto keluarga, kalender dan sajadah. Situasi pada saat observasi di rumah informan cukup ramai, terdengar suara anak-anak kecil dari dalam ruang keluarga, sedangkan informan sedang bersantai dengan istri di ruang tamu. Informan begitu ramah dan terbuka, dan terlihat bersemangat dalam menggambarkan pelaksanaan Program Raskin di Desa Sruni. Observasi dilakukan pada siang hari.

n. Informan MK

Observasi dilakukan di rumah informan di RT 06 RW 5 Dusun Leces. Informan merupakan kakek berusia 70 tahun dan sudah menjadi Ketua RT selama 40 tahun. Informan hanya tinggal sendirian istrinya sudah meninggal beberapa tahun lalu sedangkan anaknya sudah berkeluarga. Lantai rumah informan terbuat dari semen, Perlengkapan yang ada di ruang tamu informan yaitu kasur yang diletakkan di lantai, tidak ada kursi ataupun tikar untuk tempat duduk, dan satu lemari. Saat penelitian, informan sedang santai setelah beraktifitas di sawah. Informan tampak lembut dalam menjelaskan pelaksanaan Raskin di Desa Sruni. observasi dilakukan siang hari.

o. Informan ER

Observasi dilakukan di ruang kerja informan di Kantor Kecamatan Jenggawah. Informan berusia 47 tahun dan bekerja sebagai staf kesejahteraan sosial selama 15 tahun. Perlengkapan yang ada di ruangan tersebut dua perangkat meja dan kursi kerja staf, dan satu meja tanpa kursi dengan komputer di atasnya, di meja informan terdapat beberapa tumpukan berkas-berkas, dan di bagian timur meja terdapat satu lemari yang juga berisi berkas-berkas. Saat penelitian, suasana kantor sedang ramai karna jam istirahata dan informan baru saja selesai makan siang. Informan sangat ramah, selain itu informan juga aktif dan begitu tanggap terhadap setiap perbincangan, wawancara dilakukan siang hari.

p. Informan EV

Observasi dilakukan di rumah informan di RT 03 RW 02 Dusun krajan. Informan merupakan ibu rumah tangga 60 tahun dengan dua anak perempuan. Perlengkapan yang terdapat dalam ruang tamu informan adalah satu set kursi, dan sedangkan disebalah kanan ruang tamu terdapat mesin jahit, suami informan berprofesi sebagai tukang jahit sejak muda. lantai rumah informan terbuat dari semen. Informan dan suami mempunyai sawah garapan namun tidak luas. Saat penelitian keadaan rumah sedang tidak begitu ramai, hanya informan dan suami, informan tampak ramah dalam menceritakan program Raskin. Observasi dilakukan pada siang hari.

q. Informan RH

Observasi dilakukan di rumah RH di RT 03/RW 01 Dusun Krajan. Informan merupakan ibu rumah tangga berusia 32 tahun. Informan rh memiliki dua orang anak sedangkan suaminya bekerja sebagai pembuat batu bata. Perlengkapan yang ada di rumah informan satu set kursi, lemari dan televisi, lantai informan terbuat dari semen. Saat dikunjungi informan sedang bersantai dengan adik iparnya, informan tampak ramah, ceria dan bersemangat dalam menceritakan pelaksanaan program Raskin. Observasi dilakukan pada siang hari.

r. Informan SM

Observasi dilakukan di rumah informan di RT 07 RW 05 Dusun Leces. Informan merupakan ibu rumah tangga 35 Tahun dengan dua orang anak, suaminya bekerja sebagai petani. Perlengkapan yang ada di ruang tamu informan pada saat itu satu set kursi, dan lemari berisi barang-barang pecah belah, lantai rumah informan merupakan keramik berwarna putih. Saat di kunjungi informan sedang santai dan baru saja datang menjemput anaknya ke sekolah. Informan tampak antusias dan serius ketika di tanya seputar pelaksanaan Raskin. Observasi dilakukan pada siang hari.

3.6.2 Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara berdialog langsung dengan informan terkait dengan fenomena maupun permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (1994:135) wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada satu masalah tertentu yang merupakan tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih melakukan percakapan langsung. Menurut Creswell (2009:181) memaparkan bahwa

“In qualitative interviews, the researcher conduct face-to-face interviews with participants by telephone, or engages in focus group interviews, with six to eight interviewees in each group. These interviews involve unstructured and generally open-ended questions that are view in a number and intended to elicit views and opinions for participants”. (Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan

wawancara berhadap-hadapan dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan melalui telepon, atau terlibat dalam wawancara secara berkelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan).

Dalam pelaksanaannya dilapangan, Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dalam keadaan nyaman mungkin untuk memperoleh hasil informasi yang lebih mendalam, namun peneliti tidak menyediakan alternatif jawaban didalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yang menurut Idrus (2009:10) wawancara tidak terstruktur inilah yang sesuai dengan penelitian kualitatif sebab wawancara ini memeberikan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Walaupun tidak terstruktur, peneliti harus tetap mengacu pada fokus pembicaraan yang ingin ditanyakan, agar tetap terarah pada fokus yang ditentukan sebelumnya.

Agar tetap terarah pada fokus yang telah ditentukan dalam penelitian ini terdapat garis besar pertanyaan yang akan diajukan dan dijadikan pedoman dalam wawancara (*interview guide*). Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:56) *Interview Guide* adalah semacam rambu-rambu yang dipergunakan untuk mengarahkan seseorang peneliti agar tidak terjebak mencari data di luar permasalahan dan tujuan penelitian. *Interview guide* umumnya berisikan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam. Pertanyaan tersebut tidak harus berurutan, namun memungkinkan informan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat yang diajukan peneliti dengan jawaban yang panjang namun tetap dalam konteks pembicaraan mengenai penelitian Program Raskin yang dilakukan. Informan bebas menyampaikan sikap dan pandangannya. Wawancara dengan informan direkam menggunakan perekam suara pada telepon seluler baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan saat waktu luang atau jam istirahat informan agar tidak mengganggu aktifitas informan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai teknik wawancara yang digunakan peneliti, berikut merupakan penjelasan singkat mengenai proses wawancara dengan informan sebagai berikut:

a. Informan NK

Wawancara dengan informan NK dilakukan pada hari jumat 15 mei 2015 pukul 09.00 di ruang kerja informan, Kantor balai Desa Suni. Tujuan wawancara adalah ntuk memperoleh data penelitian. Situasi pada saat wawancara sangat tenang karna ruang kerja informan terletak tidak terlalu dekat ruang para perangkat desa yang lain. Proses wawancara berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab oleh informan. Hasil wawancar dengan informan NK menceritakan pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni pada tahun 2014, hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta gambaran kondisi masyarakat Desa Sruni. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam.

b. Informan FR

Wawancara dengan informan FR dilakukan pada hari kamis, 21 Mei 2015 pukul 09.00 di ruang kerja informan. Situasi pada saat itu di sekitar kantor seperti di ruang utama, dan halaman kantor sedang ramai, namun wawancara dilakukan di ruangan para perangkat yang hanya ada dua perangkat yang lainnya yang sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data penelitian. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan FR menceritakan dengan rinci pelaksanaan program Raskin di Desa sruni beserta hambatan yang menjadi penghambat pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih selama kurang lebih 1 jam.

c. Informan JN

Wawancara dengan informan JN dilakukan pada hari minggu, 07 juni 2015 pukul 11.30 di rumah informan. Tujuan wawancara adalah ntuk memperoleh data penelitian. Situasi pada saat itu sangat tenang karena keluarga informan sedang bersantai di ruang keluarga. Proses wawancara

dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan JN menceritakan dengan rinci pelaksanaan program Raskin di Desa sruni beserta hambatan yang menjadi penghambat pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih selama kurang lebih 1 setengah jam.

d. Informan SH

Wawancara dengan informan SH dilakukan pada hari minggu, 07 juni 2015 13.45 di rumah informan. Situasi pada saat itu sangat tenang karena keluarga informan sedang tidak ada di rumah dan informan baru saja selesai melakukan kerja bakti bersama warga yang lain. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan. Hasil wawancara terhadap informan SH menceritakan dengan rinci pelaksanaan program Raskin di Desa sruni beserta hambatan yang menjadi penghambat pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih selama kurang lebih 1 jam.

e. Informan SR

Wawancara dengan informan SR dilakukan pada hari sabtu, 13 juni 2015 pukul 11.40 di rumah informan. Tujuan wawancara adalah ntuk memperoleh data penelitian. Wawancar berjalan dengan santai dan lancar karena saat itu informan sudah selesai mngerjakan pekerjaannya di sawah. walaupun bahasa yang digunakan campuran dengan bahasa madura bahasa indonesia dengan logat yang kaku informan dapat dengan lancar menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Hasil wawancara terhadap informan SR menceritakan dengan rinci pelaksanaan program Raskin di Desa pada tahun 2014 sruni beserta hambatan yang menjadi penghambat pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih selama kurang lebih 1 jam.

f. Informan JM

Wawancara dengan informan JM dilakukan pada hari kami 7 juni 2015 pada pukul 16.10. wawancara dilakukan di rumah informan JM. Tujuan wawancara adalah ntuk memperoleh data penelitian. Proses wawancara berjalan dengan lancar karena informan mudah memahami pertanyaan yang diberikan dan informan menjawab dengan bahasa indonesia dengan logat

bahasa madura yang masih begitu terasa. Informan yang terbuka semakin memudahkan dalam memperoleh informasi. Hasil wawancara terhadap informan JM menceritakan dengan rinci pelaksanaan program Raskin di Desa sruni beserta hambatan selama pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 1 setengah jam.

g. Informan MR

Wawancara dengan informan MR dilakukan pada hari kamis 21 mei 2015 pukul 13.15. wawancara dilakukan di ruang tamu informan MR. Proses wawancara berjalan dengan lancar, pada saat wawancara informan MR ditemani istri yang sesekali istrinya turut membantu informan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Hal itu sangat membantu dalam kelancaran proses wawancara. Hasil wawancara terhadap informan MR menceritakan pelaksanaan program Raskin di Desa sruni beserta hambatan selama pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam.

h. Informan AS

Wawancara dengan informan AS dilakukan pada hari jumat 29 mei 2015 pukul 14.30 wawancara dilakukan di ruang tamu informan. Proses wawancara dengan lancar oleh informan. Pada saat wawancara informan AS juga ditemani istri, yang sesekali turut menambah jawaban yang dilontarkan informan dan hal itu sama sekali tidak mengganggu proses wawancara justru mempermudah peneliti dalam menggali informasi. Hasil wawancara terhadap informan AS menceritakan pelaksanaan program Raskin di Desa sruni beserta hambatan selama pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama satu jam.

i. Informan IS

Wawancara dengan informan IS dilakukan di kantor Balai Desa Sruni pada hari kamis 21 mei 2015 pukul 10.20 di Kantor Balai Desa Sruni. Tujuan wawancara ini adalah mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara berjalan dengan santai walaupun wawancara dilakukan sambil menunggu ketua RT dari dusun Krajan mengambil jatah beras Raskin, namun pertanyaan dengan lancar dapat dijawab oleh informan. Hasil wawancara diantaranya informan menjelaskan mengenai pelaksanaan program Raskin di Desa sruni

beserta hambatan selama pelaksanaan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam.

j. Informan KS

Wawancara dengan informan KS dilakukan pada hari jumat 29 mei 2015 pukul 14.00 WIB. Wawancara dilakukan di rumah informan KS. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai, walaupun wawancara berlangsung penuh dengan menggunakan bahasa jawa, namun pertanyaan yang diajukan peneliti dapat terjawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara diantaranya adalah mengenai pelaksanaan program Raskin di Desa sruni beserta hambatan selama pelaksanaan. Wawancara berlangsung kurang lebih satu jam.

k. Informan PD

Wawancara dengan informan PD dilakukan pada hari senin 2 juni 2015 pukul 11.00 di rumah informan. Situasi pada saat wawancara saat itu dirumah informan hannya ada informan dan anaknya. Namun disekitar rumah informan sangat bising. Proses wawancara berjalan dengan santai, informan menggunakan bahasa Indonesia, namun sesekali informan menggunakan kata-kata dari bahasa Madura namun informan mencoba menjawab setiap pertanyaan dengan lancar tanpa rasa canggung. Hasil wawancar diantaranya adalah mengenai proses pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni dan hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan program. Wawancara berlangsung kurang lebih satu setengah jam.

l. Informan SY

Wawancara dengan informan SY dilakukan di pendopo Kantor Balai Desa Sruni pada tanggal 21 juni 2015 pukul 11.55 WIB. Situasi pendopo pada saat itu mulai tenang karena tinggal beberapa orang perangkat desa saja yang masih berada di dalam kantor. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan SY antara lain mengenai gambaran rinci

pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni pada Tahun 2014 beserta hambatannya. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam.

m. Informan KY

Wawancara dengan informan KY dilakukan pada hari senin 2 juni 2015 pukul 12.50 WIB, di rumah informan. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Informan di temani istrinya yang juga turut membantu menjawab dan hal itu sangat peneliti dalam menggali informasi lebih dalam. Hasil wawancara terhadap informan KY diantaranya adalah menceritakan secara rinci pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni pada tahun 2014 dan hambatan yang selama ini ada dalam pelaksanaan program Raskin. Wawancara kurang lebih satu jam.

n. Informan MK

Wawancara dengan informan MK dilakukan di rumah informan pada hari senin tanggal 2 juni 2015 pukul 11.00 WIB. Situasi pada saat wawancara sangat sepi, karna informan MK hanya tinggal sendirian. Proses wawancara berjalan dengan santai karena peneliti juga menyesuaikan dengan gaya bicara informan yang sangat pelan-pelan. Namun semua pertanyaan dapat dijawab dengan informan walaupun kadang dengan jawaban yang agak singkat namun jelas. Hasil wawancara terhadap informan MK adalah menceritakan proses pelaksanaan program Raskin di Desa Sruni tahun 2014 beserta hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Wawancara berlangsung kurang lebih selama satu jam.

o. Informan ER

Wawancara dengan informan ER dilakukan pada hari jumat 29 Mei 2015 pukul 11.00 di ruang kerja informan Kantor Kecamatan Jenggawah. Proses wawancara dengan berjalan dengan lancar, dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar karena informan begitu memahami setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti. Hasil wawancara diantaranya informan menjelaskan secara rinci gambaran sebuah pelaksanaan program Raskin. Wawancara berlangsung kurang lebih selama satu setengah jam.

p. Informan RH

Wawancara dengan informan RH dilakukan pada hari jumat 15 mei 2015 pukul 11.00 WIB di rumah informan. Proses wawancara berjalan dengan lancar, namun sesekali wawancara berhenti karena informan harus menghentikan sanak-anak kecil yang sedang bermain di dalam rumah informan yang membuat suasana menjadi bising, Namun, semua pertanyaan dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancaranya dengan informan RH menceritakan seputar pelaksanaan program Raskin tahun 2014. Wawancara berlangsung kurang lebih satu jam.

q. Informan SM

Wawancara dengan informan SM dilakukan pada hari senin 18 mei 2015 pukul 10.00 WIB di rumah informan. Tujuan wawancara adalah memperoleh data penelitian tentang Program Raskin. Proses wawancara berjalan dengan santai karena informan sedang tidak melakukan kesibukan dan semua pertanyaan dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancaranya dengan informan SM menceritakan pelaksanaan program Raskin tahun 2014. Wawancara berlangsung kurang lebih satu jam.

r. Informan EV

Wawancara pada informan EV dilakukan pada hari jumat 29 mei 2015 pukul 12.50 di rumah informan. Saat wawancara EV ditemani suami, yang juga sesekali membantu menjawab pertanyaan yang diajukan dan berkaitan dengan program Raskin, dan hal ini tidak mengganggu proses wawancara namun tentunya sangat membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang mendalam, karna suami informan merupakan ketua RT sebelum ketua RT saat ini. proses wawancara berjalan santai dan pertanyaan dapat dijawab dengan lancar. Wawancara berlangsung kurang lebih satu jam.

3.6.3 Dokumentasi

Penelitian juga dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode dokumentasi diperlukan dalam

mengumpulkan data sekunder untuk menunjang data primer yang telah diperoleh. Dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk menunjang kekuatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Dokumentasi digunakan peneliti untuk mempermudah ketika menganalisis hasil penelitian dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen, data-data, buku, maupun arsip dari Desa Sruni yang berkaitan dengan Raskin. Dokumentasi yang digunakan sebagai data penelitian berbentuk tulisan dan gambar. Arikunto (2002:206) menjelaskan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berguna dalam memberikan wawasan dan pemahaman dasar maupun definisi konseptual baik pendapat pakar, yang diambil dari buku, internet dan sebagainya khususnya terkait program Beras untuk keluarga miskin, implementasi (pelaksanaan) program, selain itu dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian berupa Pedoman umum, petunjuk teknis, dokumen, laporan dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. Selain itu foto-foto yang menggambarkan atau membantu dalam mendeskripsikan fenomena khususnya terkait dengan Pelaksanaan Program Raskin pada tahun 2014 di Desa Sruni pada saat observasi dan wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya setelah pengumpulan data adalah menganalisis data. Bogdan dan Biklen (1992) dalam Usman (2009:84) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data skunder. Data skunder berasal dari dokumen Program Raskin baik yang didapat dari pelaksana Raskin Desa Sruni maupun pelaksana Raskin Kecamatan Jenggawah. Sedangkan data primer berasal dari informasi langsung para informan, baik informan pokok maupun informan tambahan. Data primer berasal dari wawancara kemudian diberi

kode dan dikelompokkan terlebih dahulu. Kemudian data tersebut dianalisa sehingga diketahui hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan sebuah penarikan kesimpulan umum dari analisa tersebut.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada proses analisis data penelitian kualitatif menurut Irawan (2006:76):

1. Pengumpulan data mentah, peneliti melakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka yang dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu seperti recorder, kamera dan lain-lain dan harus apa adanya.
2. Transkrip Data, peneliti menyalin data yang telah tercatat maupun terekam melalui recorder ke dalam bentuk tertulis sesuai dan sama persis dengan pembicaraan saat wawancara. Semua diketik persis apa adanya sesuai apa yang telah didapat saat wawancara tanpa adanya unsur pendapat dan pemikiran peneliti.
3. Pembuatan Koding, pada tahap ini peneliti membaca ulang data yang sudah ditranskrip, dan menentukan hal-hal penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian diambil kata kuncinya dan kata kunci ini yang nantinya akan diberi kode.
4. Kategorisasi Data, pada tahap ini, peneliti mulai mesederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam suatu satu besaran yang dinamakan kategori.
5. Penyimpulan Sementara, pada tahap ini peneliti sudah diperbolehkan untuk memberikan kesimpulan sementara. Peneliti mengambil kesimpulan sementara berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pada tahap ini data yang diperoleh masih mentah dan murni tanpa merubah apapun termasuk memasukkan pemikiran subjektif peneliti didalamnya.
6. Triangulasi, Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan satu sumber data lainnya. Triangulasi ini berfungsi untuk mengetahui tentang kecocokan dan ketidakcocokan asumsi dari sumber data tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber data dengan cara

meng *cross check* hasil wawancara informan yang satu dengan informan informan yang lain.

7. Kesimpulan Akhir, ada kemungkinan peneliti akan mengulangi langkah satu sampai enam berkali-kali sebelum peneliti mengambil kesimpulan dan dan mengakhiri penelitian. kesimpulan terakhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*). Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan akhir yang dirangkum dari proses keseluruhan analisis data.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Penelitian dengan metode kualitatif memerlukan pengukuran keabsahan data untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Untuk membuktikan validasi data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan-temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian (Moleong dalam Idrus 2009:145). Teknik yang digunakan dalam pengukuran validitas data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam pegujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono. 2012:125). Penelitian ini menggunakan teknik "*Triangulations of data sources* atau triangulasi sumber data. Menurut Krefting (1991:219) "*the triangulated data sources are assessed against one another to cross-check and interpretation*". (mentriangulasi sumber data adalah menaksirkan terhadap satu dengan yang lain untuk mengcross-check data dan iterpretasi). sedangkan menurut Sugiyono (2012:127) triangulasi sumber untuk mengecek kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara pada beberapa informan yang berbeda yaitu antar informan pokok, antar informan tambahan, dan antar informan pokok dan tambahan. Informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda

diharapkan dapat memperluas pengetahuan, memperoleh kebenaran yang handal dan validitas data.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan perbandingan antara pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin tahun 2014 dengan *best practice standart* yang dijadikan pedoman dalam kriteria evaluasi pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Pedoman Pelaksanaan Program Raskin

Pelaksana Raskin Desa Sruni tidak menggunakan pedoman pelaksanaan Raskin sebagai dasar melaksanakan tugas. Ketentuan mengenai kepemilikan dan penggunaan panduan pelaksanaan pada pelaksana Raskin desa ini tidak tercantum dalam panduan pelaksanaan, baik pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, maupun petunjuk teknis pelaksanaan Raskin tahun 2014, namun keberadaan pedoman pelaksanaan Raskin tersebut akan sangat membantu pihak pelaksana Raskin desa dalam melaksanakan tugas, dimana ketentuan dan cara melaksanakan program Raskin ditulis dan diatur secara tegas didalamnya.

b. Pelaksana Program Raskin Tahun 2014

Tim pelaksana Raskin di Desa Sruni terdiri dari Kepala desa, Kaur bagian Kesra, Kepala dusun, dan Ketua RT. Masing-masing pelaksana tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaan Raskin. Pembagian tugas tersebut tetap menghasilkan tugas pelaksana program Raskin yang sesuai dengan *best practice standarts*.

c. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

Berdasarkan *best practice standart*, RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah *Pertama*, rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin 2014, yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K, *Kedua*, rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat, *Ketiga*, RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin tahun

2014. Sedangkan tim koordinasi Raskin Desa Sruni tidak menggunakan ketiga syarat berdasarkan *best practice standart* tersebut sebagai dasar penargetan RTS-PM.

d. Penetapan Titik Bagi

Sesuai dengan *best practice standart*, titik bagi ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah desa dengan RTS PM setempat. Penetapan titik Bagi Raskin di Desa Sruni berdasarkan kesepakatan dari RTS, Ketua RT, dan Kepala dusun di Desa Sruni. Kesepakatan tersebut menghasilkan pembagian Raskin ditetapkan di RT, dengan mempertimbangkan pemberian kemudahan bagi RTS-PM yang menebus Raskin sehingga lebih efisien.

e. Mekanisme Pelaksanaan

1. Sosialisasi Program Raskin

Berdasarkan *best practice Standarts*, Sosialisasi dilakukan oleh tim koordinasi Raskin secara berjenjang. Sedangkan pelaksanaannya di Desa Sruni, sosialisasi program Raskin tidak dilaksanakan, baik sosialisasi Raskin kepada seluruh pelaksana Raskin desa, maupun kepada masyarakat.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi di desa diartikan sebagai satu rangkaian proses yang sama. Monitoring dan evaluasi dilakukan setidaknya setiap bulan sebelum dilaksanakannya pembagian Raskin melalui rapat harian hari senin. Hal ini sesuai dengan *best practice standarts* bahwa monitoring dan evaluasi untuk melihat penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran.

3. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari titik distribusi ke Titik Bagi hingga ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

Penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai ke tangan RTS-PM menjadi tanggung jawab Ketua RT. Hal tersebut menghasilkan pola pembagian Raskin yang bervariasi antar RT maupun antar dusun dengan sebagian besar menerapkan pola pemerataan. Berdasarkan mekanisme pembagian yang demikian, Raskin yang diterima masyarakat miskin tidak sesuai

dengan ketentuan *best practice standarts* sebanyak 15 kg/RTS/bulan. Rumah tangga miskin di Desa Sruni hanya mendapatkan beras Raskin sekitar 2-7 kilogram setiap kali alokasi, sebagian RTS miskin di Desa Sruni tidak dapat menerima manfaat Raskin setiap alokasi melainkan harus bergantian dengan RTS lainnya, jadi RTS menerima Raskin sekali setiap dua kali alokasi.

4. Pembayaran Harga Tebus Raskin

Rumah tangga penerima tidak menebus beras Raskin seharga Rp. 1600 per kilogram sesuai dengan *best practice standarts*. Melainkan 2000 per kilogram. Hal tersebut karena rumah tangga penerima harus dibebani biaya transportasi dari titik distribusi ke titik bagi dan membayar Ketua RT sebagai insentif.

f. Pelaporan

Pelaporan Raskin tahun 2014 tidak dilaksanakan setiap bulan kepada tim Raskin kecamatan, hal ini tidak sesuai seperti yang tercantum dalam *best practice standarts* dimana seharusnya pelaporan dilakukan satu kali setiap alokasi.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Raskin tahun 2014 seperti yang disimpulkan sebagai berikut:

a. Permasalahan yang timbul dari masyarakat.

Rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM 1 (data yang bersumber dari basis data terpadu) menuntut pembagian jatah Raskin, hal ini menyebabkan Raskin tidak bisa dibagikan hanya kepada rumah tangga miskin saja karena pada umumnya Raskin dibagi secara merata. Hal ini berdampak pada Raskin tidak bisa dibagikan sebesar 15 kilogram/per RTS-PM.

b. Masalah Pendataan

Pendataan RTSPM tidak berdasarkan basis data terpadu dari TNP2K. Tidak digunakannya data dari pusat tersebut pertama karena beras Raskin dibagi Rata berdasarkan banyaknya tuntutan dari warga selain penerima yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat, yang kedua karena data tersebut tidak sepenuhnya valid, untuk menghindari konflik maka beras Raskin

dibagikan tanpa mempertimbangkan daftar penerima manfaat berdasarkan basis data terpadu.

- c. Jumlah masyarakat miskin lebih banyak dari pada pagu ditetapkan.

Jumlah masyarakat miskin di Desa Sruni banyak yang tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat Raskin, sedangkan pemerintah menetapkan pagu Raskin berdasarkan DPM 1. Hal ini menyebabkan kurangnya jumlah pagu Raskin untuk desa Sruni.

- d. Masyarakat miskin tidak mampu membayar tebusan Raskin.

Rumah tangga sasaran yang terdiri dari rumah tangga miskin tidak mampu membayar tebusan Raskin. Pada umumnya warga miskin tersebut membiarkan Raskin sehari-hari di rumah RT, hingga mampu membayar tebusan.

5.2 Saran

Berdasarkan Evaluasi pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin tahun 2014, maka dapat disampaikan beberapa saran perbaikan, yaitu diantaranya:

1. Pelaksana Raskin Desa sebaiknya tetap menggunakan basis data terpadu hasil PPLS, namun perlu adanya verifikasi atau pemutakhiran kembali daftar penerima manfaat Raskin yang tidak hanya melibatkan pihak pelaksana di Desa sebagaimana yang terjadi saat ini, namun melibatkan juga pihak independen dan tokoh masyarakat. Pihak independen dapat berfungsi sebagai fasilitator independen atau delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program. Sedangkan, perlu juga melibatkan tokoh masyarakat dalam verifikasi tersebut, dengan demikian dapat diperoleh rumah tangga sasaran yang benar-benar membutuhkan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dari rumah tangga lain yang tidak menerima Raskin.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kembali yang lebih intensif tentang pelaksanaan program Raskin, mengingat program Raskin merupakan program yang sudah berjalan lama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pemahaman yang benar mengenai esensi dari program Raskin baik tentang ketentuan, kelompok

sasarannya dan mekanisme pelaksanaan hingga RTS-PM jika perlu. Sosialisasi ini diberikan kepada tim pelaksana terlebih tim pelaksana Raskin di desa maupun masyarakat. Jika perlu agar sosialisasi lebih efektif, sosialisasi dilakukan melalui media massa seperti televisi untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi program Raskin.

3. Perlu adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius dan terencana untuk meningkatkan pelaksanaan Raskin di desa, karena pada dasarnya pelaksanaan di desa lah yang dapat menentukan apakah program Raskin tersebut sesuai dengan tujuan atau tidak. Maka dari itu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Raskin desa perlu dilakukan secara lebih serius dan terencana. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh tim koordinasi Raskin kecamatan dan di atur secara jelas dalam Juklak maupun Juknis.
4. Pelaksana Raskin desa perlu menggunakan *best practice standart* program dalam melaksanakan program Raskin, karena *best practice standart* merupakan sebuah gambaran pelaksanaan program Raskin yang ideal yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan yang berisi tentang bagaimana melaksanakan sebuah program maka dari itu dengan melaksanakan program yang sesuai dengan *best practice standart*, diharapkan program Raskin akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bridgman, J. & Davis G. 2000. *Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin. NSW
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitatif, Quantitaif and Mixed Approaches 3rd Edition*. California : Sage Publications, Inc.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasa-dasar dan Aplikasi*. Malang: IKIP Malang.
- Haughton, Jonathan. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: FISIP UI.
- Lewis, J.A., Lewis M.D., Packard, T., & Souflee Jr. F. (2001). *Management of Human service program (3rd ed.)*.USA: Thomson Learning.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Patton, Michael Q. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- _____. 2002. *Qualitatif Research & Evaluation Methods 3rd Edition*.Thousand Oaks, California: Sage Publications.

- _____. 1990. *Qualitatif Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Pietrzak, J., Ramler, M., Ranner, T., & Gilbert, N. 1990. *Practical program evaluations: examples from child abuse prevention*. London: Sage publication.
- Pincus, A., & Minahan A. 1973. *Social Work Practice: Model & Methods*. Itasca,IL: F.E. Peacock Publishers.
- Roebandi, Imam. 2008. *Becoming the Winner, Riset. Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah & presentasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Soenarko. 2000. *Public Policy (Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University
- Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan perlindungan soisal di indonesia (menggagas model jaminan sosial universal dibidang kesehatan)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2011. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: alfabet
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: alfabet
- _____. 2010. *CSR Dan Community Development : Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anotomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*. Malang: Instrans Publishing.
- _____. 1996. *Perangkap Kemiskinan: Problem Dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Adiya Media.
- Suyanto, B., & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyanto, Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Wemujudkan Kesejahteraan Bangsa (Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta: PT. Gramedia.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Usman, Husaini & Akbar, Purnomo S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Sandar, aplikasi dan profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat

Sumber lain:

Krefting. Laura. 1991. Rigor in Qualitatif Research: *The Assessment of Trustworthiness*. Maret. Volume 45 nomor 3.

Kementrian Komunikasi Dan Informatika RI. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*.

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. *Pedoman Umum Raskin 2014*.

Perum Bulog. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Raskin Refleksi Permasalahn Di Lapangan*. Jakarta.

Supriyatno. 2010. *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*. FISIP UI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009

Wahyuddin, Mommad. 2012. *Implementasi beras miskin dikecamatan Turikale kabupaten Maros*. Fakkultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin. Makassar.

TNP2K. 2011. *Perepatan Penanggulanagn Kemiskinan*. Jakarta Pusat.

Internet:

BPS. 2012. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia.
<http://www.bps.go.id/Brs/view/id/165>. [diakses 1 maret 2014]

BPS. 2013. Penduduk Miskin Berkurang 0,52 Juta Orang.
<http://www.beritasatu.com/nasional/122934-bps-maret-2013-penduduk-miskin-berkurang-052-juta-orang.html>. [diakses 5 maret 2014]

BPS. 2013. Berita Resmi statistik.
http://bps.go.id/website/brs_ind/kemiskinan_01jul13.pdf. [diakses pada 7 maret 2014]

Kompas. 2011. Jumlah Penduduk Indonesia 259 juta.
<http://nasional.kompas.com/read/2011/09/19/10594911/Jumlah.Penduduk.Indonesia.259.Juta> [diakses 7 maret 2014].

Menkokesra. 2010. Penerima Manfaat Raskin 2014 Sebanyak 15,5 Juta RTS.
<http://2010.kemenkopmk.go.id/content/menko-kesra-penerima-manfaat-raskin-2014-sebanyak-155-juta-rts>. [diakses 28 maret 2014].

Menkokesra. 2010. Penerima Manfaat Raskin 2014 Sebanyak 15,5 Juta RTS <http://2010.kemenkopmk.go.id/content/menko-kesra-penerima-manfaat-raskin-2014-sebanyak-155-juta-rts>. [diakses 28 maret 2014].

Republika. 2013. Bulog Jatim Salurkan 86 Ribu Ton Raskin. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/03/18/mjv478-bulog-jatim-salurkan-86-ribu-ton-raskin>. [diakses 28 maret 2014].

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Basis Data Terpadu Data dan Indikator*. <http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/basis-data-terpadu-1/>. (Diakses pada 9 agustus 2015)/

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan. *Sumber Data Kartu Perlindungan Sosial*. <http://www.tnp2k.go.id/id/program/kartu-perlindungan-sosial/sumber-data-kps/>. (diakses pada 10 agustus 2015).

BKKBN. Batasan dan pengertian MDK. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>. (Diakses 7 agustus 2015)

Sasaran Telaah	Penelitian yang Ditelaah		
	1	2	3
Judul Penelitian	Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung	Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Melalui Mekanisme Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (Sudy Kasun Sekolah Menengah Tingkat VII Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)
Tahun Penelitian	2011	2013	2014
Keluaran Lembaga	Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang	Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Pertanyaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa besar tingkat validitas data Rumah tangga miskin penerima bantuan program Raskin di Kelurahan Pedurungan Kidul? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya pelaksanaan 	Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan program raskin, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah untuk membuat program ini dapat bekerja lebi efektif mencapai tujuannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2013 melalui mekanisme kartu calon penerima BSM di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor? 2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan program BSM dengan

	<p>Program RASKIN di Kelurahan Pedurungan Kidul?</p> <p>3. Apakah aturan dalam pembagian RASKIN di Kelurahan Pedurungan Kidul sudah tepat?</p> <p>4. Bagaimana ketercapaian tujuan Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Pedurungan Kidul sudah tepat?</p> <p>5. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Pedurungan Kidul?</p>		<p>adanya mekanisme kartu?</p>
<p>Temuan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan deskriptif persentase untuk variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul</p>	<p>Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya telah memenuhi kriteria berdasarkan Pedoman Umum raskin, yaitu: pelaksanaannya sesuai Pedoman Umum Raskin adalah tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat waktu, sedangkan tepat jumlah, pelaksanaannya tidak sesuai Pedoman Umum Raskin. Adanya penambahan raskin yang</p>	<p>Pelaksanaan Program BSM melalui mekanisme kartu calon penerima BSM di Kecamatan Rumpin capainnya belum optimal. Karena dari total alokasi kuota yang telah ditetapkan sebesar 375 ARTS (anak rumah tangga sasaran) untuk Kecamatan Rumpin tidak ada hasil rekapitulasi sekolah yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lalu ke</p>

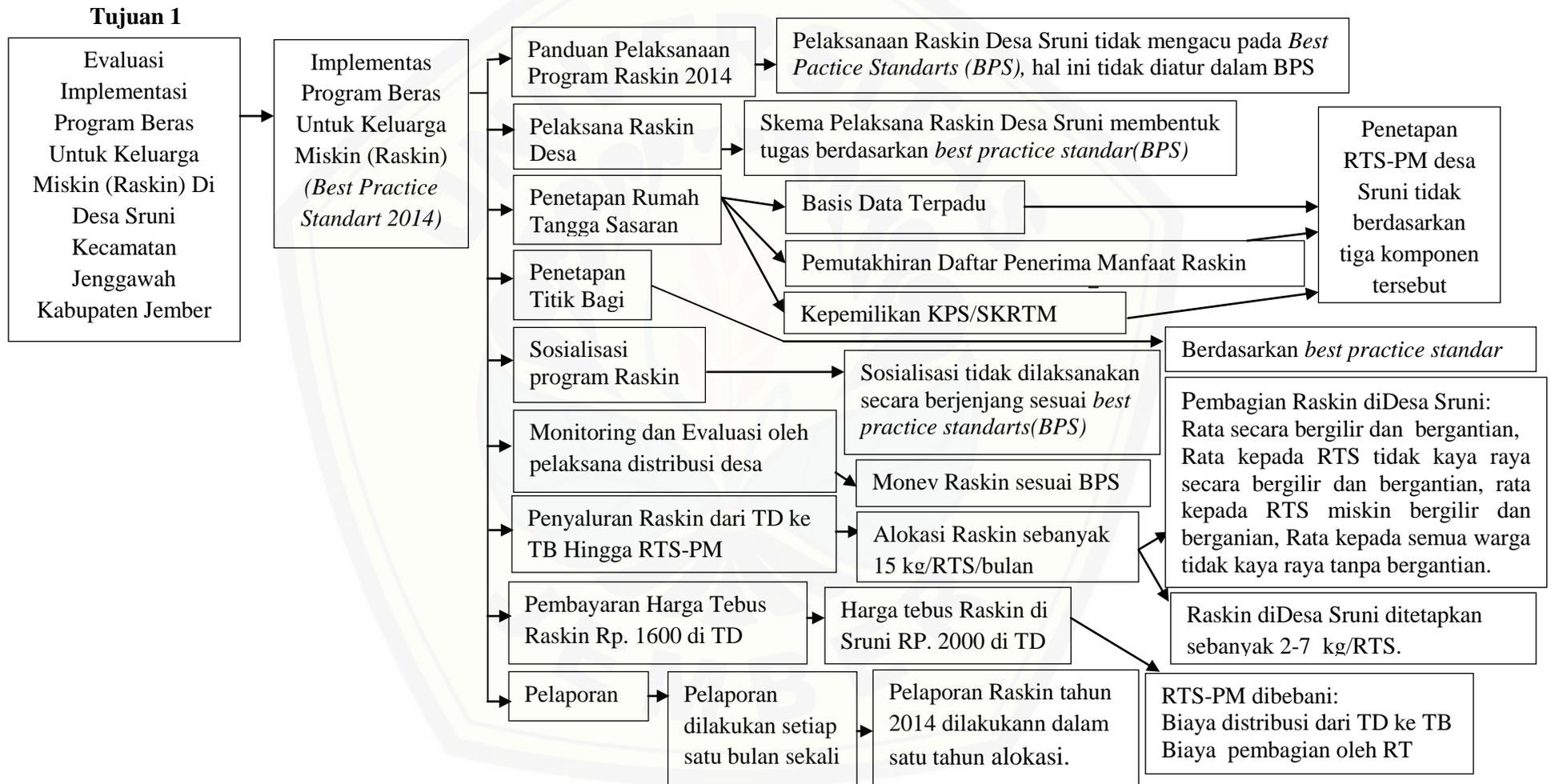
<p>dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk ketepatan sasaran Program RASKIN dalam kriteria baik karena kualitas beras RASKIN yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul merasa puas dengan kualitas beras yang dibagikan. Untuk tingkat efektivitas Program RASKIN termasuk dalam kriteria baik alasannya jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 kg per Rumah Tangga Miskin per bulan. Sedangkan Kontribusi Program RASKIN termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras RASKIN yang dibagikan kepada Rumah</p>	<p>diberikan. Dari pedum sebesar 13Kg/RTM menjadi 15Kg/RTM.</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal pendistribusian kartu calon penerima manfaat capaian kinerja lembaga penyalur (PT. Pos Indonesia) cukup bagus. Sedangkan Kendala yang dihadapi adalah waktu penerimaan kartu, pencairan dan penyaluran tidak serentak, dan kurangnya sosialisasi. Keunggulan dari mekanisme ini adalah data yang dijangkau pada target rumah tangga sarsarna dapat lebih objektif daripada mekanisme usulan sekolah (FUS).</p>
--	---	--

	<p>Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan. Dan untuk kendala-kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Pedurungan Kidul adalah pembayaran beras oleh Rumah Tangga Miskin yang terkadang kurang tertib dan tepat waktu.</p>		
Metode	Kuantitatif	Metode kuantitatif dengan model analisis efektifitas	Metode Kualitatif dengan jenis strategi studi kasus.
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan	M. Parulian Hutagaol dan Alla Asmara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hutagaol & Asmara (2007) 2. Hastuti dkk (2007) 3. Suroso (2009) 4. Mariyam Muswa (2009) 5. Yunita Sari (2010) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukaid, DFID 2011 2. Nakman, STAIN 2012 3. Made Wedaswari (n.d) UNS 4. Anjar Kusniari, UNS 2011 5. Rosyidah, UNBARAW 2013 6. Pratiwi, UniversitasTrunojoyo 7. Metalia Ulfah, UNDIP 2012

Keunggulan penelitian	Menggambarkan proses implementasi program RASKIN dan respon masyarakat terhadap Program tersebut.	Menggambarkan efektifitas dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam mendeskripsikan data terkini pelaksanaan Raskin	Menggambar evaluasi pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Melalui Mekanisme Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin disertai dengan membandingkan dengan mekanisme FUS.
Persamaan dengan penelitian ini	Menggambarkan proses evaluasi implementasi program RASKIN	Menggambarkan analisis program Raskin	Menggambar evaluasi Pelaksanaan Raskin
Perbedaan dengan penelitian ini	Memfokuskan pada kontribusi raskin dalam memenuhi kebutuhan makan rumah tangga miskin.	Memfokuskan efektifitas pelaksanaannya program Raskin	Menggunakan studi kasus

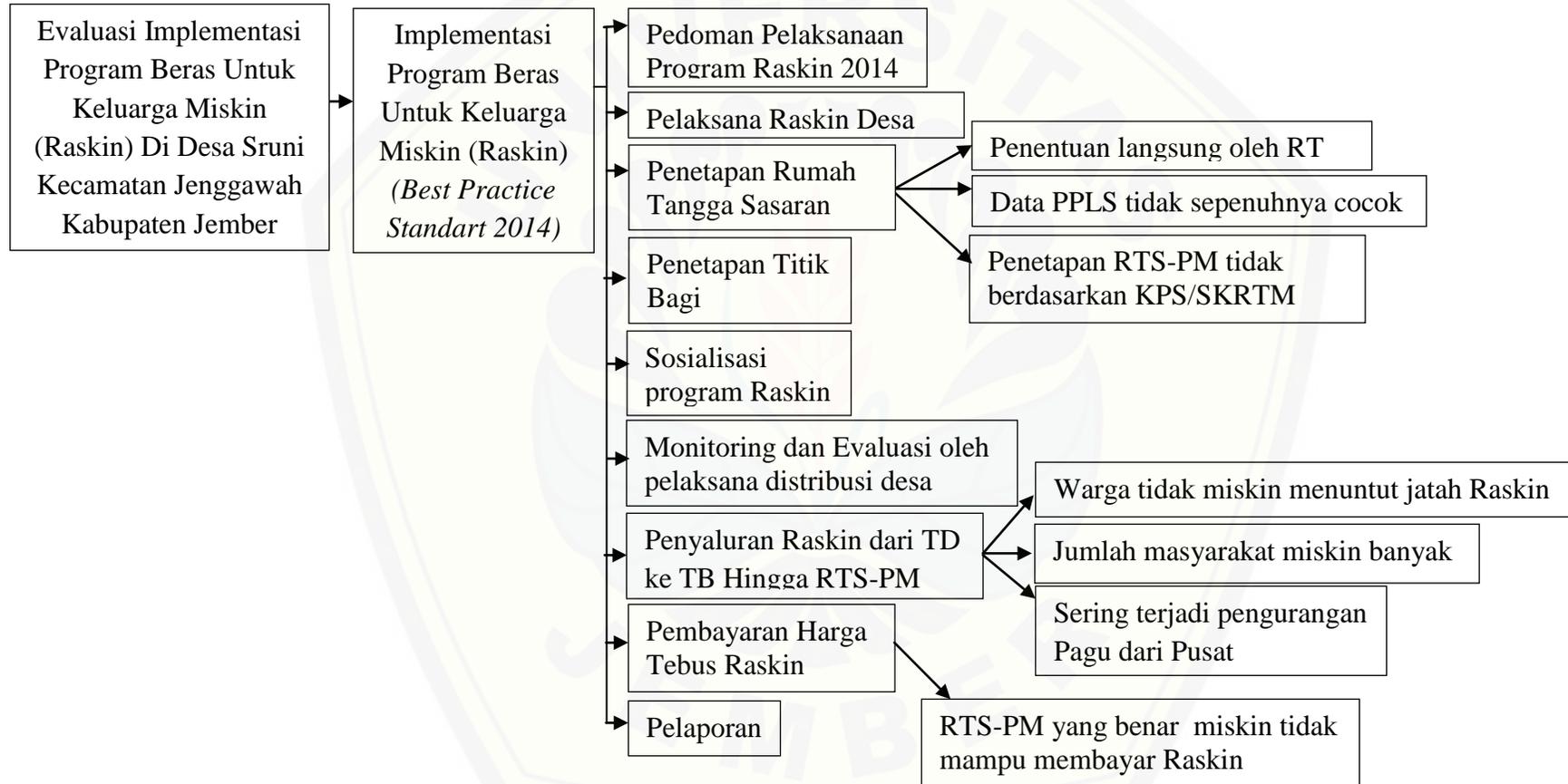
Sumber: Diolah berdasarkan penelusuran pustaka, 2015

TAKSONOMI PENELITIAN



TAKSONOMI PENELITIAN

Tujuan 2



PEDOMAN WAWANCARA

(interview guide)

Pelaksana Program Raskin Desa Sruni

Kode:1

Tgl. Wawancara:

Lokasi wawancara:

Identitas Informan

- a. Nama:
 - b. Jenis kelamin
 - c. Jabatan :
 - d. Lama bekerja :
 - e. Usia:
 - f. Pendidikan:
1. Apa saja tugas Pelaksana Raskin Desa?
 - a. Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana terkait dengan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Bulog di titik distribusi?
 2. Mekanisme Penetapan RTS PM
 - 2.a. Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat Raskin?
 - 2.b. Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak mendapatkan raskin?
 - 2.c. Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?
 - 2.d. Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?
 3. Bagaimana titik bagi ditetapkan?
 4. Mekanisme Pelaksanaan
 - 4.a Bagaimana proses sosialisasi Raskin?
 - 4.b. Bagaimana penyaluran Raskin dari Tb ke TB hingga RTS PM?

- 4.b.1 Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?
- 4.b.2 Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?
- 4.b.3 Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin setiap bulannya?
- 4.c Berapakah harga tebus raskin yang yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?
 - 4.c.1 Apakah ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin?
- 4.d Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin desa?
- 4.e Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin Desa kepada pelaksana koordinasi kecamatan?
- 5. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Raskin?

PEDOMAN WAWANCARA

(Interview guide)

Pelaksana Program Raskin Desa Sruni

Kode: 2

Tgl. Wawancara:

Lokasi wawancara:

Identitas Informan

- a. Nama:
 - b. Jenis kelamin
 - c. Jabatan:
 - d. Lama bekerja:
 - e. Usia:
 - f. Pendidikan:
-
1. Apa saja tugas Pelaksana Raskin Desa?
 2. Apakaah pelaksana Raskin Desa disertai dengan Pedoman Pelaksanaan?
 3. Apakah pelaksana Raskin Desa disertai dengan panduan pelaksanaan Raskin?
 4. Mekanisme penetapan sasaran
 - 4.a. Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat Raskin?
 - 4.b. Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak mendapatkan raskin?
 - 4.c. Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?
 - 4.d. Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?
 5. Bagaimana titik bagi ditetapkan?
 6. Mekanisme Pelaksanaan
 - 6.a Bagaimana proses sosialisasi Raskin?
 - 6.b. Bagaimana penyaluran Raskin dari Tb ke TB hingga RTS PM?

- 6.b.1 Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?
- 6.b.2 Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?
- 6.b.3 Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin setiap bulannya?
- 6.c Berapakah harga tebus raskin yang yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?
 - 6.c.1 Apakah ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin?
- 6.d Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin desa?
- 6.e Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin Desa kepada pelaksana koordinasi kecamatan?
- 7. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Raskin?

PEDOMAN WAWANCARA

(interview guide)

Pelaksana Program Raskin Kecamatan Jenggawah

Kode:3

Tgl. Wawancara:

Lokasi wawancara:

Identitas Informan

- a. Nama:
- b. Jenis kelamin
- c. Jabatan di Pemerintahan Desa:
- d. Lama bekerja di Pemerintahan Desa
- e. Usia
- f. Pendidikan

1. Apa saja tugas Pelaksana Raskin Desa?
2. Apakaah pelaksana Raskin Desa disertai dengan Pedoman Pelaksanaan?
3. Mekanisme Penetapan RTS PM
 - 3.a. Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat Raskin?
 - 3.b. Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak mendapatkan raskin?
 - 3.c. Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?
 - 3.d. Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?
4. Bagaimana titik bagi ditetapkan?
5. Mekanisme Pelaksanaan
 - 5.a Bagaimana proses sosialisasi Raskin?
 - 5.b. Bagaimana penyaluran Raskin dari Tb ke TB hingga RTS PM?
 - 5.b.1 Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?
 - 5.b.2 Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?

5.b.3 Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin setiap bulannya?

5.c Berapakah harga tebus raskin yang yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?

6. Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin Desa kepada pelaksana koordinasi kecamatan?



PEDOMAN WAWANCARA

(Interview guide)

Penerima Manfaat Program Raskin Desa Sruni

Kode: 4

Tgl. Wawancara:

Lokasi wawancara:

Identitas Informan

- a. Nama:
 - b. Jenis kelamin
 - c. Usia:
 - d. Pendidikan:
-
1. Mekanisme penetapan sasaran
 - 1.a. Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat Raskin?
 - 1.b. Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak mendapatkan raskin?
 - 1.c. Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?
 2. Bagaimana titik bagi ditetapkan?
 3. Mekanisme Pelaksanaan
 - 3.a. Bagaimana proses sosialisasi Raskin?
 - 3.b. Bagaimana penyaluran Raskin dari Tb ke TB hingga RTS PM?
 - 3.b.1 Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?
 - 3.b.2 Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?
 - 3.b.3 Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin setiap bulannya?
 - 3.c. Berapakah harga tebus raskin yang yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?
 - 1.c.1 Apakah ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin?

Kode	POINTERS PERTANYAAN	VERBATIM
A	Latar belakang informan	
A1	Inisial	NK
A2	Jenis kelamin/umur	Laki-laki/60 th
A3	Jabatan	Kepala Desa Sruni
A4	Lama bekerja	8 Tahun
A5	Pendidikan Terakhir	S2
A6	Tanggal Wawancara	15 mei 2015
B	Pelaksana Distribusi Raskin Desa	
B1	Apa saja tugas Tim Pelaksana Raskin Desa	Ya saya hanya bertanggung jawab terhadap terlaksananya bantuan Raskin ini, kalau masalah administrasi ya semua yang ada dibalai saling membantu, kalau beras yang ke masyarakat itu ya pak kampungnya itu sudah saya serahkan kepada pak kampung masalah dapatnya berapa, siapa-siapa yang dapat saya gak tau sudah apa katanya pak kampung sama RT-RT nya.
B2	Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana terkait dengan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Bulog di titik distribusi?	Ya ada lah, jadi waktu beras datang ada ya siapa-siapalah yang ada disini nanti ngecek berasnya, tapi gak pernah ada pengembalian ini selama ini.
C	Apakah pelaksana Raskin Desa disertai dengan panduan pelaksanaan program?	Ya sebenarnya ada, Itu kan sebenarnya aturan main ya, cuma kalau saya yang penting beras itu kita gak ikut ngambil, kan beras itu kalau sudah sampai ke Desa jadi haknya desa. Iya kan pedoman umum yang buku itu, ya kan gak pake itu, memang biasanya kita baginya suka-suka, haknya desa asal kita gak selewengkan, saya rasa gak masalah.
D	Mekanisme penetapan RTS PM	
D1	Bagaimana mekanisme penetapan RTS PM?	Secara formil kita punya data rumah tangga miskin, ya datanya dari pusat. tapi jumlah beras miskin itu kan sebenarnya 15 kg dengan harapan paling tidak sedino iku adang setengah kilo sewulan, perkoro kulupan golek nang sawah, iwak'e iwak welud dan sebagainya kan, itu idealnya. Kita bicara kan idealnya. Itu kan berdasarkan kuota, sudah ada kuotanya dari kecamatan. jadi kita itu

		<p>kan tidak bisa, jadi misalkan orang miskin disini tambah. Sedangkan kita dapatnya kan berdasarkan kuota itu. Data sudah ada, pagu sudah ada sekian ton, Kemudian ditingkat RT itu semua orang kan mintak jadi mungkin ya dalam tanda petik orang yang gak miskin itu mintak, sehingga pembagiannya itu kita tidak bisa mengikuti data itu.</p> <p>Dan pembagian berasnya paling tidak, bisa lima kilo bisa tiga kilo. Karna kita ini, kalau mereka gak <i>dibagei</i> (diberi) “<i>loh aku podo-podo rakyat, aku yo podo rakyat kene</i> (loh, saya rakyatnya, saya rakyat disini) masalah miskin nggak miskin wong semua itu kalau sudah ada beras <i>kabeh ngaku miskin</i> (semua mengaku miskin), kalau nggak ya kita dimushi warga. <i>Sing penting wes gak dimushi rakyat, lek gak ngunu gak gelem mbagi RT nya</i>, (yang penting tidak dimushi rakyat, kalo tidak begitu RT nya tidak mau membagikan) Kalau sudah kayak gitu <i>karoan</i> (mendingan) gak ada Raskin, kalau gak ada Raskin kan berarti gak ada orang miskin. Kan namanya beras <u>miskin</u>. Jadi penentuan RTS-PM nya itu kan ada memang dari pemeirntah, kan disampaikan di Kecamatan itu, pagu dan jumlah penerimanya, wes kono-kono ra wes dum-dumen timbang sek kesulitan pokok pak kades pak perangkat gak macam-macam, perkoro iku wes mampu gak ngurus, daripada dikembalikan.</p>
D2	Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin?	<p>Ya aslinya yang berhak itu kan janda-janda tua, orang yang dengan penghasilan yang rendah punya anak usia sekolah, pokoknya untuk orang-orang yang benar-benar miskin lah ya, tapi ya itu tadi, kalo sudah di RT semuanya ngaku miskin, bisa dibilang yang kayapun dapat. Akhirnya gak ada kriteria kan semua dapet, kalok gak gitu, ya kita dimushi warga. jadi kita fleksibel <i>nyambut gawe enak iyo</i> (kerja juga enak). kalau menurut saya sekarang saya rasa seperti itu. Jadi gak sama antara rumah tangga miskin dengan penerima jadi yang mbagi suka-suka wes siapa yang dianggap miskin.</p>
D3	Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?	<p>KPS gak ada itu kan langsung dari pusat, kita gak tau tentang itu, apalagi SKRTM, gak usah pakek itu, pokoknya kita tau orang itu orang miskin, ya</p>

		udah kasikan. <i>Wes dum-dumen kono wes</i> (ya bagi-bagikan sana) asal pak kades sama pak perangkat desa gak macem-macem. Ya kita baginya suka-suka wes, Apane SKRTM kan sudah dibagi rata, kan gak mungkin kita ngasih SKRTM kepada semua warga yang dapat.
D4	Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?	Kita ada Mudes, tapi kita data lama, ya kita mau meng update ya, <i>apane sing ate di update wong trae wes didum roto</i> (apanya yang mau di update kan sudah dibagi rata) ini kemarin sebenarnya ada update data RTS. tapi sekarang, rumahnya bagus, jadi relatif sekali. Miskin ini kan istilah, orang yang berpenghasilan rendah. Wong ndeso iki sakti-sakti, kita ngomong kita petani buruh. Sehari paling tidak 20 ribu, sebulan kerja kan 600 ribu, kalau dihitung matematik koyok-koyok gak cukup, tapi nyekel hp, nduwe sapi, nduwe pedah montor, lantai-lantae kramik, timbang ditolak yo ayok rek di dum roto, kita pesta, pis-tipis pokok rata.
E	Bagaimana titik bagi ditetapkan?	Titik distribusi itu, tekone beras kan, disini, dari bulog itu langsung kesini. Jadi kalo titik bagi itu sebenarnya kesepakatan bersama lah, ya kasun ya RT-RT ya warganya juga, enaknya gimana, karna memang ada desa yang titik bagi sana titik distribusinya itu jadi satu. Jadi pembagiannya gak di RT, tapi dibalai desa. kalo disini ya kesepakatannya di RT-RT nya itu.
F	Mekanisme Pelaksanaan	
F1	Bagaimana proses sosialisasi Raskin?	Kalau sosialisasi di Desa nya ya cukup saya ke Kasun-kasunnya, tapi biasanya ya saya sampaikan kalau Rapat hari senin itu, kalau hari-hari Biasa saya ngumpulkan kasun kan sibuk, soalnya kan cuma memberi tahu hari dan tanggalnya ya mungkin sedikit himbauan. nantik kasunnya mengkoordinasi RT-RT itu sudah. Kalau yang sosialisasi di kecamatan, ya saya setiap awal tahun bersama Kesranya itu.
F2	Bagaimana penyaluran Raskin dari TD ke TB hingga RTS PM?	Iya jadi beras itu setelah dari bulog ke sini, kan langsung dibagi ke Kasunnya, sudah itu jadi tanggung jawab Kasunnya masing-masing, begitu juga nanti kalau sudah sampai di RT ya terserah RT nya.

1	Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?	Kalau pastinya jumlah yang diterima masyarakat saya gak begitu tahu berapa kilo, karna memang sudah saya serahkan kepada RT nya, <i>wes opo jare RT, RT sing weruh</i> (terserah RT, RT yang lebih tahu), yang pasti sudah tidak 15 kilo lagi, karna banyak yang minta itu, jadi ya sekitar 5 kilo sampai tiga kiloan itu sudah, ya gimana lagi kan.
2	Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?	Sama kayak penentuan siapa yang dapat, sama jumlah berasnya berapa, itu sudah jadi ketentuan RT, tapi kan RT itu biasanya ngikuti jumlaharganya. Yang minta beras yang ngaku miskin kan banyak, <i>ate dibagei 15 kiloan?yo gak iso, entok endi RT ne, yowes iku.</i> (mau dibagi 15 kilo per orang? Ya tidak bisa, RT dapat beras dari mana, ya itu lah). Minta ke Kades, gimana, orang pagunya segitu dan sudah jelas pembagiannya dusun ini sekian,dusun ini sekian, gak bisa diotak atik. Gimana caranya RT itu beras sekian sak (karung) cukup untukarganya.
3	Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin setiap bulannya?	. Iya, setiap bulan itu dapat. Yang gantian juga ada, tergantung RT Nya mau diatur bagaimana beras itu, bagaimana mensiasati dengan banyaknya warga
F3	Berapakah harga tebus raskin yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?	Kalau masalah itu saya gak tahu, itu berbeda tiap RT, dan sudah menjadi tugas RT sama Kasunnya itu, tapi kalau dari pemerintah seribu berapa itu, seribu enam ratus, tapi kan ada biaya becak itu, ya siapa yang nanggung biaya angkut itu kan kita gak ada dana untuk itu.
1	Apakah ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin?	Ya ada lah, untuk biaya angkut dari sini ke RT-RT, biasanya kan diangkut sama becak motor itu kan sama pak RT nya, o kalau di Darungan itu pakai pik up,jadi satu kali angkut, kalau bolak-balik kasian juga itu jauh ada sekitar 5 kiloan dari kantor desa itu kalau darungan t. tapi gak seberapa lah, kan ditanggung orang banyak,
F4	Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin desa?	“Monitoring dan evaluasinya ya ada lah, tapi gak selalu, paling ya waktu mau pembagian saya pantau, sekarang kan sudah aman, sudah sana bagikan sudah yang penting gak ada masalah. intinya ya hanya pengarahan itu, laksanakan tugas sebaik-baiknya, jangan sampai menyimpang, Ya karna nanti kalau

		menyimpang nanti sampean kena pelaporan dan sebagainya menggelapkan beras miskin . kalau dari kecamatan itu tidak ada, cuma kalau pelaksanaan itu sering kesini orang kecamatan itu.
F5	Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana Raskin Desa kepada tim koordinasi kecamatan?	<p>Pelaporane ya yang itu nggak pelaporan yang tiga kilo, ya formalitas aja, ya makanya kalau boleh saya usul beras miskin itu gak ngefek karna hanya dimakan 3-5 hari saja, jadi itu bukan beras miskin, beras pertimbangan, timbang gak intok beras, itu yang terjadi dan tidak disini saja, beras miskin itu ya ada lah, tapi gak ngefek untuk orang miskin andai kata betul-betul misalnya 15 kilo, nah itu. Sebenarnya masyarakat desa itu sudah sampai pada ekonomi mandiri blonjo gak jaluk tonggong orang itu kalau sudah kepepet akan berupaya, begitu ada seperti ini ya alhamdulillah tapi ini ya jadi masalah bagi kita distributor, seperti itu kemarin bantuan apa, itu data tahun berapa.</p> <p>jadi ya masalah pelaporan, kita laporkan, ya kita tanda tangan, formalitas aja. Kalau kita laporkan yang itu kan gak boleh, ya makanya saya ceritakan fakta. Sing penting pak kades pak perangkat gak ngampung beras miskin iku. Masalah kulaitas ya relatif.</p>
G	Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Raskin?	<p>Hambatan ya dari warganya sendiri, <i>lek perlu RT ne iku gak gellem mbagi</i> (kalau perlu RT nya tidak mau membagikan). kalau program Raskin dari pemerintah sendiri itu bagus, beras 15 kilo untuk masyarakat yang gak mampu, cocok program pemerintah, saya setuju itu, tapi kurang sempurna dalam tata laksanaanya, yang mbagi jangan sini, bagi dewe (bagi sendiri). Kalau masyarakat dapatnya tiga kilo, gak mengobati itu kalau Cuma tiga kilo, sebetulnya yang ngefek itu yang 15 kilo, meskipun diharapkan, <i>berres beng tembengan</i> (beras pertimbangan) timbang gak dapat beras. gak mengobati itu. Ini kalau diuangkan sebulannya bisa 7 juta setahunnya bisa sekitar 80 Juta.</p>

Kode	POINTERS PERTANYAAN	VERBATIM
A	Latar belakang informan	
A1	Inisial	FR
A2	Jenis kelamin/umur	Laki-laki/22 Tahun
A3	Jabatan	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Desa Sruni/
A4	Lama bekerja	3 tahun
A5	Pendidikan Terakhir	SMK
A6	Tanggal Wawancara	21 mei 2015
B	Pelaksana Distribusi Raskin Desa	
B1	Apa saja tugas Tim Pelaksana Raskin Desa	“Saya ya paling kalau cuma ada kumpulan gini ini, kesra yang nyampaikan ke kampung (pak Kasun). Ya Cuma mengawasi membagi, beras dateng tanda tangan ya udah dibagi. Kalau dilapangan Kasun sudah,. Kades ya taken itu mbak, pembayaran ke bulog... Iya yang nandatangani Kades, BAST itu pak kades.. Kalau saya Cuma kalau mengetahui ada taken gitu. Kalau ada kumpulan sosialisasi-sosialisasi kan kesra mbak sama Kadesnya.
B2	Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana terkait dengan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Bulog di titik distribusi?	Iya selalu mbak, ya kadang pak Kadesnya langsung bareng sama RT-RT itu, ya kadang pak perangkat juga. Nantik mesti TKSK nya tanya.
C	Apakaah pelaksana Raskin Desa disertai dengan Panduan Pelaksanaan program?	Pedoman umum, gak tau mbak ya kalau dari sana (kecamatan) itu yang mesti DPM itu, penerima manfaat, gak tahu kalau sebelum saya, gak tahu ya mbak mungkin dulu-dulu nya ada, gak tahu saya mbak,kayak apa contohnya. Ada mungkin mbak.
D	Mekanisme penetapan RTS PM	
D1	Bagaimana mekanisme penetapan RTS PM?	Pendataan sudah ada mbak dari itu, kecamatan sudah dikasih DPM kalau sosialisasi itu mbak. Iya ada nama-namanya lengkap sama alamatnya. Tapi ya gimana ya, gak makek itu sudah mbak, kan disini dibagi rata mbak, jadi Kasun itu sudah yang tanggung jawab ndata di warga.
D2	Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak	Ya yang miskin-miskin itu mbak, janda-janda itu. Tapi kan mbalik lagi, itu

	mendapatkan Raskin?	kan di sisni dibagi rata, jadi kriterianya ya tergantung RT. kadang kan RT itu gak enak gitu mbak ke warga lainnya kalau gak dikasih, jadi ya dikasih aja meskipun orangnya mampu. Enakan ppokpok di Desa Sruni ini mbak, asal beras terbagikan.
D3	Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?	Gak ada mbak, kalau dapat, dikasikan ya sudah. Iya kalau kayak program BLT itu lengkap mbak, kalau kayak Raskin ini gak perlu, kalau memang itu gak mampu ya sudah dikasih. desa itu gak tau, Distribusinya gak tau, ya dari sana sendiri. Desa itu gak tau, dulu anak sekolah itu. Ndisek BLT itu, ada lagi tiga sakti itu tapi kok belum ada kabar sampai sekarang,tapi sudah dikirim datanya. Diminta TKSK nya kecamatan, datanya dari sini dikirim ke dinas sosial.otomatis yang punya KPS itu punya jamkesmas.Kalo Raskin gak usah pakek itu. Mulai dulu Desa gak tau. Tau-taunya itu anak-anak sekolah minta ke sini, minta KPS katanya, desa gak tau, ya itu terus cuma dikasih surat keterangan tidak mampu. Saya pikir, KPS itu dari mana gitu saya.
D4	Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?	Dari kecamatan dikasih surat itu aja sudah mbak, mungkin dulu-dulunya ada, pertama awal ada Raskin gitu, DPM-DPM itu dari Desa nanti diajukan ke kecamatan. (apa DPM berasal dari mudes), kurang tau itu, kalao penerima itu Kasun yang tau. (Ada gak mudes) selama saya disini gak ada mbak, taunya Cuma kalau ada surat kalau udah Raskin. (skrtm nya gimana) gak ada mbak, Gak dicantumkan yang layak yang belum layak? Nggak dicantumkan mbak, sama antara tahun 2014 sama 15 sama. Kan sebenarnya dapatnya 15 kilo mbak, katanya orang-orang itu, aku kok gak dapat-aku kok gak dapat, akhirnya dibagi tiga, dibagi berapa, kan akhirnya banyak mbak. Kalau yang 2014 sebulan sekali yang sekarang ini sebulan bisa 2 kali. Biasae Raskin itu sampek 13 bulan yang sering. Setau saya gak ada musyawarah desa Cuma kita disuruh ngumpulin DPM. Jadi nanti DPM 1 2 sama gak ada perubahan. Kemarin itu ada masalah, taken itu ditandangani semua sama kades, adek

		ngurusi sendiri berita acara ke bulog ke kebunsari. Iya yang nandatangani Kades sama saya. Iya itu yang gak layak itu langsung digantikan, ya nggak, itu biasanya Kasun yang paling tau. BAST itu pak kades.
E	Bagaimana titik bagi ditetapkan?	Wah, itu kesepakatan itu kayaknya dulu mbak, saya gak tahu, memang sudah dari dulu kayak gini, saya masuk memang sudah begitu.
F	Mekanisme Pelaksanaan	
F1	Bagaimana proses sosialisasi Raskin?	Sosialisasi mungkin dulu-dulu, sekarang udah nggak. Ya memang gak ada, selama saya disini gak pernah ada. ada Raskin ya udah dibagikan.
F2	Bagaimana penyaluran Raskin dari TD ke TB hingga RTS PM?	Ya dari Sini di serahkan ke Kasunnya itu sudah apa katanya kasunnya mbak, saya taunya RT-RT yang jemput berasnya dari sini, macem-macem itu ada yang pakek motor diimbak, pakek becak kadnag, kalau yang Darungan itu beda sendiri mbak pakek pikep, ya Kadednya itu Cuma sama mungkin RT nya kadang ya nggak. Kadang pagi itu sudah datang berasnya mbak RT belum Kumpul itu sudah datang, aa katanya saya. Kadnag sampek siaaang RT-RT nya sudah banyak yang pulang itu baru datang wes balik lagi rt-rt nya itu. Kan kadang macet kandang ada gangguan dijalan itu mbak, jadi gak mesti pagi datangnya beras itu.
1	Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?	Kan tiap RT nya beda mbak, jadi RT nya yang tau.
2	Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?	kalok dari sini sudah pasrah sama RT nya , terserah dah mau dibikin kayak gimana sama RT nya. Yang penting gak ada kisruh-kisruh lah mbak, aman ini buktinya bak.
3	Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin setiap bulannya?	Iya setiap bulan ada, tapi biasanya ada keterlambatan jadi gak setiap bulan. Kalok masalah yang gantian gitu, ya ada kayaknya mbak, kurang tau, RT nya yang tau pokoknya mbak
F3	Berapakah harga tebus raskin yang yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?	Beda-beda juga mbak, sekampung bisa beda itu, tergantung RT nya.
1	Apakah ada partisipasi dari masyarakat untuk	Gak ada kayaknya mbak, ya Cuma berasnya itu mungkin tapi gak 1600. Kan

	membantu pembiayaan distribusi Raskin?	1600 itu Kasun dari sininya. Jadi ya mungkin lebih sedikit untuk bayar becaknya ta bensinnya gitu paling.
F4	Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin desa?	Gak ada mbak, pokok berasnya terbagi. kalau desa Sruni gak kayak desa lain, enak'an „masyarakatnya tau wes. Itu langsung kasun mbak, tapi kan tiap desa itu gak sama kadang desa-kadang Kesra yang nanggung itu kalau disini itu Kasun. Kasun langung ke petugasnya itu. Iya setor uang nya itu, iya tunai mbak. Kalau saya Cuma kalau mengetahui ada taken gitu. Kalau ada kumpulan sosial-sosial kan kesra mbak, yowes raskin Kasun ae wes gitu. Gak ada ini mbak kalau evaluasi dari kecamatan, paling Cuma dimintai DPM, saya kumpulan gitu tok mbak. Setau saya gak ada.
F5	Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana Raskin Desa kepada tim koordinasi kecamatan?	iya saya ke kecamatan, ya kumpulan gitu mbak, tapi jarang kalau Raskin, Cuma paling dapat surat besok Raskin gitu, yang pasti itu wes dimintai DPM.. paling dapat surat besok Raskin gitu, yang pasti itu wes dimintai DPM Gak tau kalau dulu awal ada Raskin. Yang ke kecamatan Cuma diminta dpm 1 dpm 2, DPM 2 gak setiap bulan, kadang di ropel ini kemarin dari januari sampai desember. Yang diropel itu dpm 2.gini kadang itu mbak, kan satu bulan dua kali raskin itu, kadang telat sampek bulan ke berapa gitu baru ada Raskin gitu wes. jadi gak setiap bulan. Kalau dpm 2 itu gak mesti mbak kadang hampir satu tahun kadang, ya sama kayak DPM 1 itu wes gak mesti dari kecamatan, kadang dimintak kadang nggak, sing penting wes dijalankan gak diambil ruwet. DPM 2 nya ya sama kayak DPM 1 mbak, ya itu sudah sesuai DPM 1Namanya-namanya sama Iya dari tahun-tahun kemarennya sama. Kalau sini yang penting beras dibagikan mbak. Kalau dilaporkan tetep 489 ya formalitas aja mbak Kan dibagi rata. Yang penting rata itu mbak.
G	Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Raskin?	mungkin sekarang berasnya itu mbak, itu kurang layak itu mbak, tapi langsung nanti lapor ke TKSK itu aja, mesti TKSK itu nelpon, pak gimana berasnya berasnya. Kalau yang penyalurannya alhamdulillah gak ada.Gak ada hambatan

		ini mbak lancar kalo Raskin, gak ada masalah apa-apa.
--	--	---



Kode	POINTERS PERTANYAAN	VERBATIM
A	Latar belakang informan	
A1	Inisial	JN
A2	Jenis kelamin/umur	Laki-laki/47 tahun
A3	Jabatan	Kepala Dusun Darungan
A4	Lama bekerja	5 tahun
A5	Pendidikan Terakhir	SMA
A6	Tanggal Wawancara	07 Juni 2015
B	Pelaksana Distribusi Raskin Desa	
B1	Apa saja tugas Tim Pelaksana Raskin Desa	Jadi tugasnya saya itu lebih pada mengkoordinir RT-RT mbak, kalau ada kumpulan kalau ada kabar Raskin apa saya yang membeberitahukan kepada RT,mbagi juga per RT dapat berapa sak gitu. Kalao RT ya pembagiannya, siapa yang mendapatkan. istilahnya saya yang mengawal RT gitu lo.
B2	Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana terkait dengan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Bulog di titik distribusi?	Ya ada, biasanya kan kalau Raskin itu RT-RT kan kumpul di balai desa, jadi nanti pasti ada yang ngecek itu
C	Mekanisme penetapan RTS PM	
C1	Bagaimana mekanisme penetapan RTS PM?	“Kalau yang Ndata nya itu ya RT soalnya RT yang lebih tau warga-warganya itu seperti apa, sebenarnya ada sudah mbak dari pemerintah,RT mnya yang menentukan ini layak ini nggak gitu. cuma, ya,,karna di desa. apa ya, dapat semuanya. cuma ada yang gantian, yang kayapun, saama dapat semua, Yang punya sawah pun itu sama dapat, karna yang diatas itu kan gak tau kita berhadapan dengan masyarakat itu bagaimana, makanya kalau memang mau diprosedurkan, yang ndata jangan dari sini, dari pihak mana ta, itu baru. pemerintah taunya ya buat orang miskin itu sudah, kecuali memang ada utusan dari pemerintah, satu orang untuk mendata per RT, itu dipilih sudah, benar-benar dipilih, kalau benar-benar pendataan dari atas itu yang dapat, kasih sudah, tapi yang data jangan sini, kalau sini tetep dimusuhi masyarakat, kayak

C2	<p>Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin?</p>	<p>dikecam lah intinya gitu, Kalau kriteria, Kan Raskin itu sebetulnya untuk orang yang gak mampu ya, tapi karna kebijakan dari, kayaknya semua seluruh ya dimana supaya mendapatkan rata ya, soalnya gini kan mbak ya, kalau gak diratakan misalkan ada iuran apa kerja bakti, <i>halah sing intok beras ae mari wes</i> (yang mendapatkan beras saja lah yang iuran): gitu mbak, ada yang bilang “ <i>raskin gak uman, lek enek urunan dijuluk</i>”(Raskin gak kebagian, kalau ada iuran kita diminta) Padahal selama ini g ada jarang tarik'an, seharusnya kalau raskin ini harus dipilih, lima belas kilo satu orang, kalau seperti itu kan enak tapi masalahnya biasanya rumahnya gedong tapi penghasilannya gak ada, jadi tidak bisa dilihat dari rumah fisiknya, kalau dilihar dari sisi rumah sperti mampu semua, kadang-kadang orang yang merantau sampek rumahnya gedong tapi untuk makan gak ada, kadang meskipun yang kaya itu, kok gak dikek'i gitu, Jadi biar gak ada omong yang gak enak ya dikasi dah semua. Jadi gak ada kriteria sudah. Dapat semua, kecuali mungkin ada salah satu yang gak ditebus, tapi kayaknya jarang mbak, dapat semua, mau diatur kayak prosedur ya rame nantik, jadi antara yang gak punya sama yang sedang bedanya tipis ya, kadang nanti yang rumahnya dari bambu punya sawah, yang rumahnya gedong gak punya sawah sama sekali enol, itu kan biasanya ada yang merantau keluarganya, padahal gak punya sawah, apalagi kalau dilihat dari sepeda motor sekarang rata-rata punya semua, listrik rata semua, lantai gagk ada yang tanah, kalau yang ngikut prosedur kan, lantaikan begini, rumahnya begini kan gitu, gak bisa, yang penting itu dari perangkatnya gak neko-neko, kalau ada beras ya dibagikan semua, gak ada masalah, gak beban sudah. Kalau saya masih ngambil itu beban,dapatnya gak seberapa kalau ketmu jeleknya selamnya, alhamdulillah g pernah ada masalah, karna dibgi rata. Karna saya juga merasakan jd RT, lama saya jadi RT, saya ditunjuk inni jadi Kasun.</p>
C3	<p>Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin</p>	<p>Gak ada, memang gak ada, kalau memang ada kan ada pemberitahuan ke saya,</p>

	ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?	selama ini gak pernah ada, SKRTM juga gak ada, ya gak ada itunya kita mau ngomong apa. kalau kita yang milih kan jadi masalah dengan yang lain. Kalau saya maunya yang gak punya itu, tapi masalahnya nanti dengan masyarakat, kalau yang diatas pemerintah gak tau, kita yang tau, kalau memang mau tepat sasaran, ya itu tadi, datangi, kalau memang dilihat dari segi rumah, tapi kan gak bisa dilihat dari segi fisik, paling orang-orang tertentuyang bisa dilihat dari fisiknya, ya jangan RT nya yang data, tanya secara diam-diam lah.
C4	Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?	Gak ada sih, Cuma nanti RT nya ya bilang ke saya. ya kita alihkan ke yang betul2 g punya, untuk tambahan carikan ke yang paling minim, nanti RT nya laporan, pak ini meninggal, ya coba cari warga yang paling gak mampu, tapi kadang-kadang yang miskin tadi bilanganya “gak punya uang” tapi kan kebanyak ya ke keluarga yang satu rumah, ya itu yang kesulitan kalau ada warga baru, ya saya bilang pengaturannya dari samean apa mau diambihkan ke yang lain itu sedikit-sedikit. Ya ya selama ini bisa itu ngatasi RT nya ya ndak tau bagaimana caranya. Makanya saya kasian ke Rt nya itu, bayaran juga gak ada di marahi warga kadang-kadang, ya bingung saya kalau ada tamabahan, yang mampu gak dikasih nanti juga protres, ya sebenarnya kan gak layak makan beras seperti itu kalau yang mampu, ya sebetulnya beras seperti itu kan betul-betul untuk orang miskin ya, saya juga heran yang kaya-kaya itu ya minta, harusnya sadar, tapi gak sadar-sadar. Kalau ada apa-apa, sumbangan itu ngakunya gak mampu semua, berobat itu ya ngurusin surat itu, ya bisa se, tapi kan jarang. Sebetulnya yang harus dapat itu yang miskin-miskin itu ya, janda-janda, bisa nanti apa dari sini, tapi ada surve, jadi masyarakat tau palin tidak itu kalau yang ndata bukan kita, kalau RT nya yang ndata ntar “o RT nua ini yang gak genah,
D	Bagaimana titik bagi ditetapkan?	Titik distribusi di balai Desa, Kalau untuk pengambilan kan soalnya disini jauh mbak, paling jauh disini, jadi di ditetapkan di RT beras datang itu,
E	Mekanisme Pelaksanaan	

E1	Bagaimana proses sosialisasi Raskin?	Iya sosialisasinya ya kades ya, nanti kades ke kasun, kasun ke RT. melalui rapat itu sudah kalau ke Kasun.
E2	Bagaimana penyaluran Raskin dari TD ke TB hingga RTS PM?	Pake pick up mbak kalau yang dari darungan, Rencananya kan lebih enak diambil sendiri sudah, saya gak mau tau. Tapi ribet nanti kalau sendiri-sendiri soalnya jauh. kalau maunya disini ambil sendiri-sendiri, tapi jauh ke balaidesa bisa antara 4-5 kilo, bensinnnya berapa. La untuk pembagian makanya ke RT itu, Ya yang penting gak ada apa-apa, ya jangan sampek orang dapatnya juga gak seberapa, masyarakat sekarang sudah tahu semuanya.
1	Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?	“Kalau warga dapat berapa itu jelasnya RT yang tau, tapi masing-masing RT itu kan gak sama, ya memang sudah bagiannya RT itu. disini paling luas, paling banyak penduduknya juga sini, kedua sruni leces .kalau yang gantian itu bisa empat kilo, kalao yang gak gantian ya dilihat dari jumlahnya, ya sama sih tapi kan cuman bulannya. Jadi saling menyadari lah masyarakatnya, paling banyak yang gantian tapi ya terserah RT nya, apa dapat sedikit dapat semua gitu, RT nya yang menentukan yang penting beras ini jangan sampek kemana-mana,
2	Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?	Itu sudah jadi tanggung jawabnya RT ya mbak, bagi berapa, gimana mbagi ya saya serahkan RT, Kalau RT kan bisa memperkirakan beras segini, warga segini, gimana beras itu bisa cukup, apa gantian, yang jelas ada yang gantian, dibagi berapa kiloan ya RT nya yang meenetukan
3	Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin setiap bulannya?	Nggak setiap bulan jadinya, Cuma ada yang gantian, yang kayapun, saama dapat semua. Makanya kalau memang mau diprosedurkan, yang ndata jangan dari sini, dari pihak mana ta, itu baru, kalau yang punya sawahpun itu sama dapat, karna yang diatas itu kan gak tau kita berhadapan dengan masyrakat itu bagaimana, pemerintah taunya ya buat orang miskin itu sudah, kecuali memang ada utusan dari npemrintah, satu orang untuk mendata per RT, itu dipilih sudah, benar-benar dipilih, kalau benar-benar pendataan dari atas itu yang dapat kasih sudah, tapi yang data jangan sini, kalau sini tetep dimusuhi

		<p>masyarakat, kayak dikecam lah intinya gitu, ada yang gantian, kadang RT jawabnya “pak kampung, iku masyarakat enek sing jaluk maneh, haduh beras dari mana lagi “ gitu saya, kalau dibilang kurang ya banyak kurangnya, dikurangi terus dari sananya, kalau dulu sempat 200 sak, sekarang disini termasuk yang yang terbanyak, tapi Cuma lebih satu sak, itu darungan dapatnya 123 sak, yang lain itu dapat 122 sak, beda satu sak Cuma, karna masyarakatnya paling banyak sini, bingung kadang-kadang RT nya gimana mau bagi, saya bantu mikir itu.</p> <p>ya kebanyakan memang gak cukup. kalau sini ada 700 kk, dapat semuanya, Dulu kan saya jadi RT, itu sudah gantian, itu misalkan ada 60 KK, ya diambil 30 KK, misalkan ada 10 sak ya, ya itu gimana caranya 10 sak itu rata untuk satu RT, tapi itu kadang-kadang satu sak nya kan 15 kilo, setelah ditimbang itu gak sampek 15 kilo.</p>
E3	Berapakah harga tebus raskin yang yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?	<p>harga tebusnya 24 ribu persaknya, karna jauh bisa 25 ribu, untuk ongkos mobilnya itu, sisanya kan ada 123 ribu,, untuk mobilnya dr balai ke sini itu 100 ribu, sisanya untuk yang ngangkat.</p> <p>Kalau warga nebusnya per kilo, kurang paham saya, tergantung RT nya, itu berapa ya,, berapa ya,, kurang paham saya.</p>
1	Apakah ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin?	<p>Ya ada mbak, untuk biaya pick up nya kesnini itu, 4-5 kan lumayan jauh, kalau mau diangkut sama sepeda motor malah bolak-baliknya jauh. Bensinnya saja berapa kan, jadi memang lebih efektif pakek pick up. Lah itu tadi harga tebusnya 24 ribu persaknya yang harus disetor, karna jauh bisa 25 ribu, untuk ongkos mobilnya itu, sisanya kan ada 123 ribu,, untuk mobilnya dr balai ke sini itu 100 ribu, sisanya untuk yang ngangkat.</p>
E4	Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin desa?	<p>jarang sih mbak kalau evaluasinya, karna memang sudah gak ada masalah sebetulnya, ya cuman kalau kurang seminggu gitu kalau datangnya hari kamis kan rapatnya hari senin itu mesti sudah dibahas. kan setiap senin itu ada rapat, nanti kalo misalkan datangnya hari kamis ya dibahas itu, lancar ndak, ada</p>

		<p>masalah ndak, kan gitu, kalau kata kadesnya ya gak usah neko-neko yang penting gak ada masalah. Enak mbak santai Cuma gitu aja, tapi ya gak setiap senin mbahas raskin terus, kalo pas beras mau datang aja, itu koordinasi ke Kasun-kasun. Ya saya juga gitu ke RT-RT itu, ada masalah nggak, ya keluhannya kalau ada tambahan keluarga itu, “ini pak pung ada tambahan, berasnya segini” ya gimana lagi.</p>
E5	<p>Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana Raskin Desa kepada tim koordinasi kecamatan?</p>	<p>Ya kalo kasun ini gak ikut-asal aman gak ada masalah sama warga , kalo yang pelaporannya ke kecamatan ya perangkat sudah,Cuma pembelian beras itu tapi kan gak terlalu repot kalo itu.</p>
F	<p>Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Raskin?</p>	<p>Kendalanya ya pendataanya itu, karna RT yang ndata, makanya itu kalau memang mau diprosedurkan, yang ndata jangan dari sini, dari pihak mana ta, itu baru, dari pemerintah, satu orang lah untuk mendata per RT, bear-benar dipilih sudah, biar masyarakat tau. Kalau gini masyarakat taunya RT sama kampungnya nya yang ndata, kalau ada yang gak dapat ya kita yang kena. \Ya KPS sama SKRTM itu juga menjadi kendala, ya gak ada itunya kita mau ngomong apa. kalau ada KPS atau SKRTM paling nggak kan sebagai bukti kalau ini pendataan dari atas gitu kan, kalau kita yang milih kan jadi masalah dengan yang lain. Kalau saya maunya yang gak punya itu, tapi masalahnya nanti dengan masyarakat, kita yang berhadapan langsung dengan masyarakat</p>

Kode	POINTERS PERTANYAAN	VERBATIM
A	Latar belakang informan	
A1	Inisial	JM
A2	Jenis kelamin/umur	Laki-laki/45 Tahun
A3	Jabatan	Kasun Karang Kokap
A4	Lama bekerja	8 Tahun
A5	Pendidikan Terakhir	SMP
A6	Tanggal Wawancara	7 Juni 2015
B	Pelaksana Distribusi Raskin Desa	
B1	Apa saja tugas Tim Pelaksana Raskin Desa	Kalo Raskin itu, saya tugasnya mengawal jalannya raskin ke masyarakat, kadang itu punya alasan, mendadak ngabari raskin kalo mendadak gak ada yang siap ditebus sendiri. Kepala desa pasarah ke Kasun kasun pasarah ke RT, tapi dengan catatan beras ini lari kemana, saya ingin tahu, ada petugas dari jember ini pengen tahu beras ini apa bener-bener nyampek, kedua, jangan main-main dengan saya, tolong jangan , dikorupsi lah kasarannya diambil kamu banyak, memang saya cek, nyuruh anak buah saya, umpama pak RT sana dapat 15 sak, saya suruh cocokkan, iya kalo nyampek kalo RT ngambil separo, kan saian, kalo sini 8 RT 2 RW, kalo Darungan 15 RT, Krajan 10, leces 10. Sini sebenarnya 10 RT, 2 RT itu luas yang seharusnya 2 RT jadi 1 RT.
B2	Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana terkait dengan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Bulog di titik distribusi?	Ada mesti itu datangnya dilihat RT-RT
C	Mekanisme penetapan RTS PM	
C1	Bagaimana mekanisme penetapan RTS PM?	Memang sudah dipasarhkan sama RT, Kan RT yang paling dekat berdampingan dengan warga, kalau saya kan pak kampung ngurusi satu dusun tapi RT kerja sama dengan saya, kalau misalkan itu jangan dikasih” ya nggak dikasih..ya gak ikut data dari atas saya gak megang itu data dari atas. Ya siapa

		yang layak ya dikasih sudah. Kan disini memang banyak orang miskinnya. Kalau saya benar-benar ketat ya, kalau yang berkecukupan gak saya kasih, akhirnya warga dapat 5 kiloan. Kadang ada yang gak puas mereka mengadu ke pak kampung,
C2	Bagaimana kriteria RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin?	kalau yang berbau sawah itu gak saya kasih, kadang ada orang yang punya sawah satu petak, tapi ekonominya setiap hari itu serba kurang. Pokal, akhirnya sasarannya pak RT, ya saya yang jadi sasaran, kampungnya ini, Ya memang saya himbau seperti itu, ada orang kaya disini, yang <i>pokal</i> (berani), langsung saya bilang suruh ambil ke toko saya, nggak berani. Banyak yang gak dapat. Sekarang rumah mana yang gak punya sepeda motor, meskipun yamaha 80 harganya 600 ribu kan punya, skrang umpunya acuannya sepeda motor tander, tander itu sekarang berapa 4 juta setengah, kadang memelihara sapi, bagi hasil itu ya saya beri. Jadi sulit saya ini, sebagai orang yang berhadapan dilapangan, memang banyak orang miskinnya, jangan takut kalau warganya dibilang miskin memang keadaannya seperti ini, kalau kades saya itu wataknya, orang mau tanya waktu kumpulan ya, gak berani. Tapi pemerintah kalau semua kayak pak tinggi ini bagus, gak pernah neko-neko, ringan tangan, Cuma sebenarnya pendapat pak tinggi itu ada benarnya, dihapus, memang benar, tapi ya mikir orang miskin butuh beras, diganti infrastruktur lain, ityu sudah ada bagiannya sendiri.
C3	Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?	Gak ada ini, gak ada KPS,SKRTM apa dari dulu memang gak ada. ya sudah dapat bagikan sudah.
C4	Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?	Gak memalui musyawaroh desa, gak ada, ya kalo akhir tahun ada musyawaroh tapi gak Raskin tok, bahas macem-macem. Kalo ada yang meninggal ganti langsung, kalo RT lain saya gak tau, kalo orangnya gak puunya, itu saya kasih 10 kilo, iya kasian, memang haknya orang itu sebetulnya 15 kilo, kalo

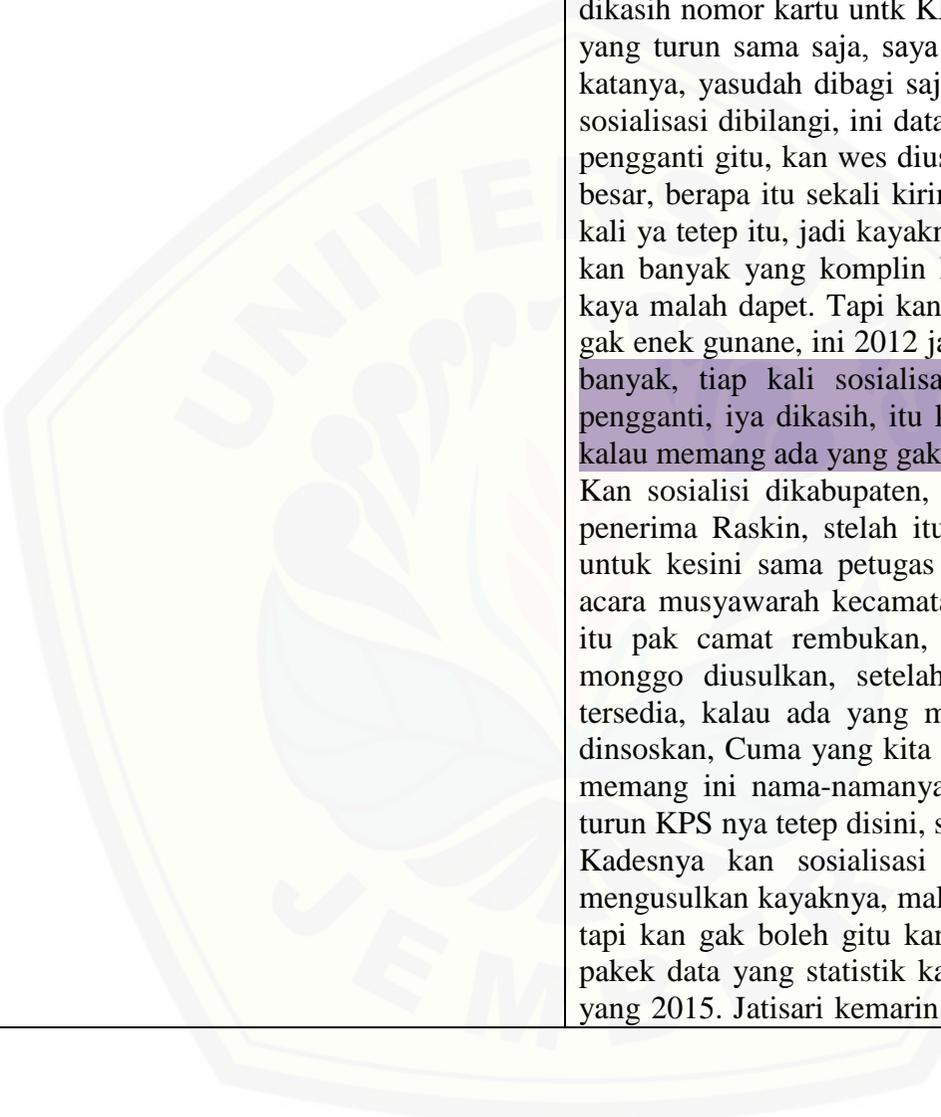
		ada anaknya ya kasikan anaknya, kalo suaminya yang meninggal itu tetap, kalo keduanya meninggal dikasikan anaknya, kan memang gak punya. kalau ada keluarga baru, saya usahakan gimana kiranya yang gak berhak lah, di cabut, alasannya beras dikurangi. Kan seperti ini (jari kellingking, jari manis dan jari tengah), jari kelingking ini orang yang parah, jari manis sama jari tengah ini kan rip-mirip ini, kalau ada yang gak dapat berasnya dikurangi ya jari manis inni yang jadi korban, malah tetangga ini tahu sendiri kalo ada Raskin gak kesini, langsung ke RT-RT,
D	Bagaimana titik bagi ditetapkan?	Iya dari bulog itu kan langsung turun ke desa,ke desa langsung dibagi empat dusun, . Setelah itu, RT-RT yang ngambil, RT yang menyalurkan Cuma selisih satu sak lebih banyak sruni darungan, yang lainnya itu dapat 122 sak, 3 dusun sama , kesepakatan lah itu dari lama sudah pembagiannya di RT,sampek sekarang. tapi dulu itu pembagiannya ada yang ngambil dikampungnya, ada yang ngambil ke Desa warga itu. Kalau KK nya kurang lebih mungkin itu, ah,, mungkin 600 KK,
E	Mekanisme Pelaksanaan	
E1	Bagaimana proses sosialisasi Raskin?	Sosialisasi kalau yang ke masyarakat gak ada mungkin karna program lawas ya, gak ada. kalo sosialiasi paling ya pak perangkat itu ke kecamatan.
E2	Bagaimana penyaluran Raskin dari TD ke TB hingga RTS PM?	Itu pak kasun yang tanggung jawab, yang bawa dari Desa itu RT-RT sudah, dibagi di RT.
1	Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?	Kebanyakan dapat 5 kilo,tapi tergantung banyaknya warganya gimana RT nya mbaginya. Beras lima kilo itu mengobati, coba janda itu 10 kilo sangat mengobati, kan nanaknya gak sekilo, seprapat gitu, puuh,, mengobati itu sudah kalo untuk janda.
2	Bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat?	Kalo pembagian berasnya ituSesuai rakyatnya, ada yang 7 saik satu RT itu rakyatnya sedikit. Saya mikir-mikir itu pembagiannya supaya rata, itu yang seharusnya 2 RT jadi satu itu dapat 18 sak itu,
3	Apakah masyarakat mendapatkan alokasi beras rutin	Setiap bulan dapat, terusan, kecuali gak nutut beras nanti, ini libur, kalau gak

	setiap bulannya?	<p>mau ini saya bagi dua, kan berasnya dikurangi, kalau gantian malah gak mau, kan sama sama haus. Apalagi kalau dihapus menjerit orang miskin itu, gak datang aja dua bulan itu, kan telat, banyak yang datang kesini tanyak.</p> <p>Jarang disini itu gantian, sedikit-sedikit asal rutin, tapi berasnya jelek kualitasnya, kan separuh harga itu, tapi kalo jelek kan memang murah memang,</p>
E3	Berapakah harga tebus raskin yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?	<p>Nebusnya kan 16 dari bulog, satu kilo 1.600 rupiah, jadi satu sak 24.000, kalau warganya kan ada ongkos becak, Jadi nebusnya 25, dua ribu limaratus</p>
1	Apakah ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin?	<p>Ya itu nebuskan kan sudah 2500, sudah ongkos becaknya. kalo RT masak mau nanggung. Kalo Raskin gak ada, mungkin yang jadi RT itu males, iya kan RT kan dari ongkos becak itu kan dapat, apa 7000 apa 6000 masukan lah, ongkos becaknya. bayarannya lo Cuma 50 ribu. satu bulan itu 50 ribu, kalo BPD desa itu 350, malah gak ada pekerjaannya itu.</p>
E4	Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin desa?	<p>Kalau monitoring evaluasinya ya itu ya himbuan bentuknya, jangan sampai menyimpang, ini beras untuk orang miskin, harus tepat sasaran gitu. stiap rapat hari senin itu kalau mau raskin itu bilang. Jangan sampai kisruh lah.</p>
E5	Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana Raskin Desa kepada tim koordinasi kecamatan?	<p>Ndak ndak tau saya kalau masalah laPorannya itu gimana perangkat itu sudah.</p>
F	Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Raskin?	<p>Kendalanya berasnya itu sedikit yang minta itu banyak, kan dikurangi-dikurangi terus, padahal disini banyak memang yang gak punya banyak yang ekonominya minim, ya kayak saya bilang tadi ukuran miskin itu kan sulit, nanti umpama ukuran sepeda motor, semua orang punya sepeda motor meskipun harganya 600 ribu, tapi buat makan masih repot. Kan sulit yang mau mbagi itu. Karna disini memang banyak orang miskinnya.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Kode	POINTERS PERTANYAAN	VERBATIM
A	Latar belakang informan	
A1	Inisial	ER
A2	Jenis kelamin/usia	Perempuan/47 tahun
A3	Jabatan/Lama menjabat	Staf bagian Kesejahteraan sosial Kecamatan Jenggawah/15 Tahun
A4	Pendidikan	S1
A5	Tanggal wawancara	29 Mei 2015
B	Pelaksana Distribusi Raskin Desa	
B1	Apa saja tugas Tim Pelaksana Raskin Desa	Kaitannya dengan Raskin itu memang kalau kita sudah sosialisasi ke kabupaten, kan mengundang pak Kades juga petugas Raskinnya entah kesranya, soalnya kan gak sama setiap desa itu, kadang Ekbangnya, kayak Wonojati sama Cangkring itu Ekbangnya yang ngurus Raskin Desa. yang lain-lain lainnya udah terserah Desa.
C	Apakah pelaksana Raskin Desa di sertai dengan panduan pelaksanaan program?	Ya itu pedoman umumnya desa kan punya itu. kan setiap habis sosialisasi di kabupaten, kita itu kan dikasih Pedum (pedoman umum), jadi Pedum nya itu kita kasih ke petugas di Desa. Kalau sini kan ada delapan desa, biasanya dikasih sembilan, satu untuk kecamatan dan delapan untuk desa. Ada pedumnya. Biasa kalau di desa mbak, dikasi Pedum ya ditaruh, asal tiap bulan dapat Raskin, halah yo pokok mben ulan intok Raskin ngunu lo (asal tiap bulan dapat Raskin gitu lo). Kan pokok gak ada masalah gitu mungkin. ya seperti itu.
D	Mekanisme penetapan RTS pm	
D1	Bagaimana mekanisme penetapan penerima manfaat Raskin?	Iya jadi pendataanya sudah ada dari Jember. awal tahun kan ada berita acara, kesepakatan kan, pagu raskinnya dari jember kan sekian, RTS PM nya yang nerima sekian. Itu ada semua. setelah itu, ya kesepakatan pas acra muskel itu ya sekaligus sosialisasi, kan kepala desa nya sepakat Raskinnya di Desa dapat

D3	Apakah rumah tangga penerima manfaat Raskin ditandai oleh kepemilikan KPS atau SKRTM?	<p>sekian sudah diterima gitu lo.</p> <p>Yang dapat KPS kan yang dapat Raskin sama BLT itu kan. Iitu langsung dari pos mbak, itu dari pos langsung ke Desa, desa mendistribusikan kepada masing-masing penerima KPS. Jadi kecamatan itu juga gak ada pembeitahuan dari TNP2K. Itu dari TNP2K, dari jakarta. Itu kan dulu penerima KPS itu yang gak sesuai yang sudah kaya-kaya itu, kan kita suruh mengirimkan tapi turunnya tetep aja kayak tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>(sambil membuka berkas tentang Raskin dan KPS) Ini kan data Raskin, Cuma data penerima Raskin mesti masuk di KPS gitu lo. (SKRTM) Seperti ini, untuk mengusulkan rumah tangga yang sudah keluar, yang sudah pindah, sudah kaya, yang ndak layak terus kan kita kirim seperti ini, ini cangkring juga kirim, ini rekapan, ini kan kita kirim ke Jakarta, petunjuknya kan kita kirim ke TNP2K, cumak turun datanya itu gak pernah berubah gitu itu lo mbak, sama saja, jadi kita itu kayak'e mengusulkan itu tetap aja, tiap tahun tetap seperti ini, ini untuk penerima Raskin kan, penerima Raskin per Desa, jadi tiap tahun kalau kita mau raskin mesti kita dapat seperti ini (form SKRTM). Ini tahun 2014, jadi nanti yang 2015 tetep lagi seperti ini, jadi ya tiap kali turun ya begini ini, datanya dilihat sama lagi sama lgi, jadi apa ngusulkan kayaknya percuma, Sruni ini gak ngirimkan SKRTM, ini hanya beberapa Desa saja, kadang kan Kadesnya <i>wegah</i>, apa yang didapat ya itu sudah yang dibagi, Sruni kayak'e gak kirim, iya ini hanya Cangkring sama Wonojati yang kirim update SKRTM, yang berani mem back up jadi cangkring dan wonojati berapa KK gitu lo, jadi pak Kadesnya berani gitu mbak, karna memang gak berhak, berani mencabut KPS nya itu. tapi kalau Desa lain gak tahu juga, apa gimana sakjane ya banyak yang gak sesuai juga. Jane kan Kecamatan yang kirim. Cuma TKSK tahu, kita kan punya TKSK untuk koordinasi dengan dinsos. Kan dulu pernah dikasih petunjuk kalau untuk Raskin untuk laporannya harus</p>
----	---	--

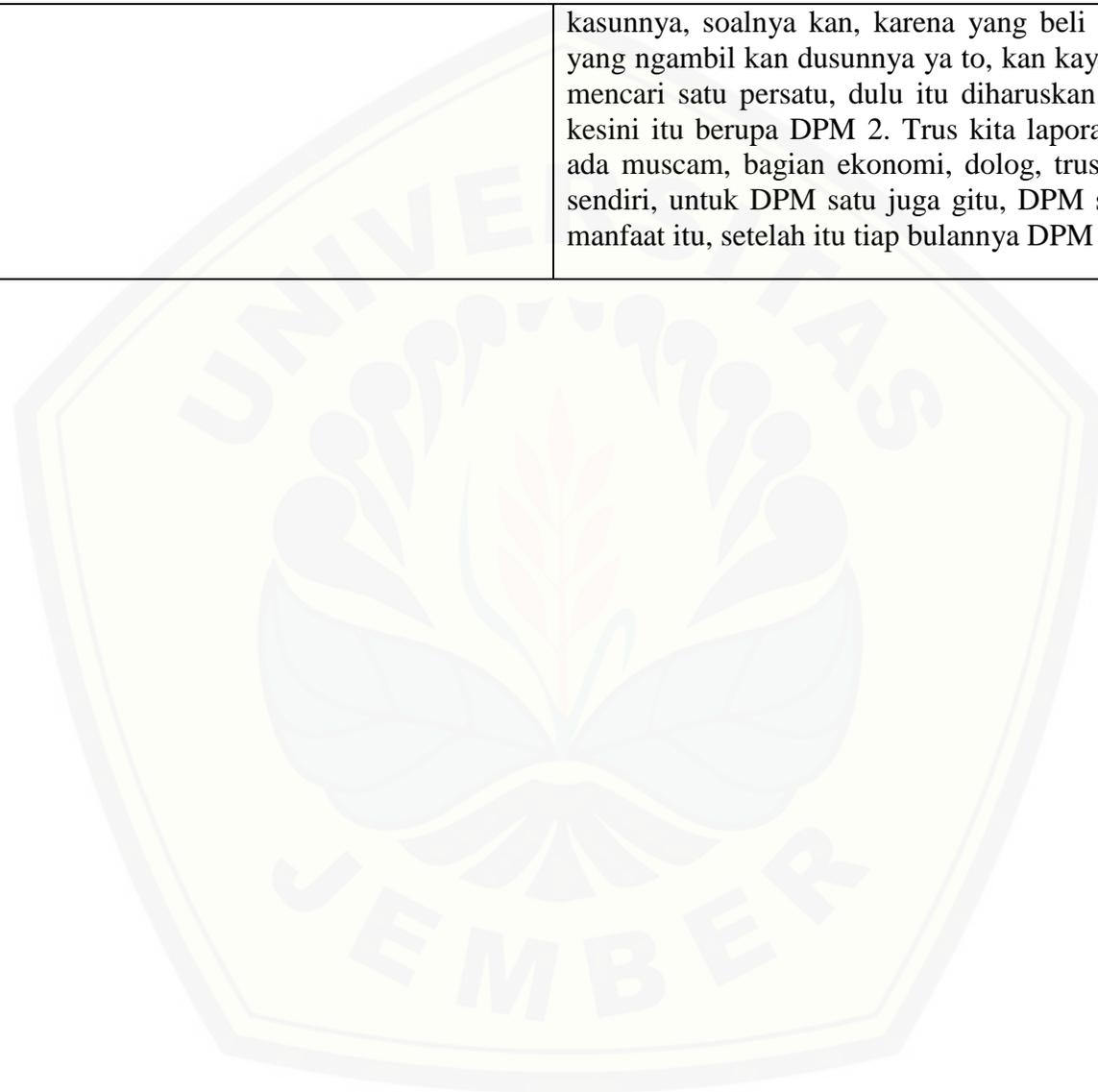
		<p>dikasih nomor kartu untk KPS nya. Ya ini aslinya kita mengusulkan kita, tapi yang turun sama saja, saya sampek capak. “buk kok ini aja yang turun,gitu katanya, yasudah dibagi saja sesuai itu aja dulu saya bilang. Cuma dulu pas sosialisasi dibilangi, ini datanya kalau gak valid tolong dikirmkan, usulan RT pengganti gitu, kan wes diusulne, kita kan kirim ke TNP2K to, biayanya juga besar, berapa itu sekali kirim, dua kali sudah kita kirim yang turun beberapa kali ya tetep itu, jadi kayaknya menunggu, kan sekarang ada validasi data itu, kan banyak yang komplin BLT banyak yang gak dapet, yang disebelahnya kaya malah dapet. Tapi kan sak repotan usul datengnya tetep, dadi yo koyok gak enek gunane, ini 2012 jatimulyo juga mengusulkan. Ini blangkonya masih banyak, tiap kali sosialisasi kan mesti dikasih ini untuk rumah tangga pengganti, iya dikasih, itu kan sama pak camat dirapatkan, gimana datanya, kalau memang ada yang gak sesuai silahkan dikasi form seperti ini.</p> <p>Kan sosialisasi dikabupaten, stelah itu kan kita dapat lembar panjang daftar penerima Raskin, stelah itu kan pak camat ngasi undangan ke pak Kades, untuk kesini sama petugas Raskin, kan mesti setiap awal tahun ada berita acara musyawarah kecamatan lah setelah itu di desa disosialisasikan. Stelah itu pak camat rembukan, seperti ini datanya kalau memang ada usulan monggo diusulkan, setelah itu bebrapa desa mengusulkan, blangkonya tersedia, kalau ada yang mengusulkan ya kita kirim ke TNP2K tembusan dinsoskan, Cuma yang kita kirim ke Dinsos kan rekapannya saja, la ini kalau memang ini nama-namanya turun KPS nya, jadi kalau nama-namanya gak turun KPS nya tetep disini, sama TKSK nya diitipkan disini. Setelah dari sini Kadesnya kan sosialisasi ke Desa ke masyarakatnya, Jenggawah juga mengusulkan kayaknya, malah kalo Jati sari itu menolak BLT yang ittu mbak, tapi kan gak boleh gitu kan, kan kita kalao nyalahkan data, sedangkan kita pakek data yang statistik kan yang 2008 terus di revisi 2011, la lanjutan ini yang 2015. Jatisari kemarin ngambilnya BLT di POLRES Jember, soale telat</p>
--	---	---

		<p>dapat teguran.</p> <p>Masyarakat memegang Kartu itu, Iya dapat, itu kan dari pos langsung ke Desa, itu malah gak tau mbak kecamatan kalau ada KPS, jadi dari TNP2K lewat pos langsung ke desa gitu, kan dulu dikasih itu, kayak tabel nama-nama penerima Raskin digulung mbak, dari TNP2K ke Desa sekalian sama KPS nya, itu disuruh laporan ke bagian ekonomi, tapi kita gak tau datanya yang mana, terus saya telusuri di Desa, endi buk, katanya, dicarik, terus, iki ta buk, gitu katanya, dadi glondongan iku gak dibukak mbak, yo wong deso dapet kayak gitu itu gak dibukak, kan kita harus laporan kalau sudah diterima gitu, tapi kita gak gau bentuk KPS seperti apa, dulu kan sudah ada sosialisasi tentang KPS itu, kita Cuma tau dari gambarnya aja, soalnya KPS nya langsung diserahkan ke masyarakat, mungkin ya lewat kampungnya mbak kalau posnya ngirim ke rumah-rumah satu desa ada banyak gak mungkin mbak.</p> <p>Ini kita kan melaksanakan PBDT, ini kerjasama Dinsos, Bapemas, BPS kan gitu, malah ada petugasnya sendiri itu mbak, ambil 40% dari rumah tangga yang miskin itu, la, soalnya itu di floorkan diforum kan ada fasilitatornya. Kalau gak layak coret-coreit gitu. Tapi hasilnya yang ini belum.</p>
D4	Apakah ada pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/muskel?	Ya di desa seharusnya juga ada mbak untuk Mudes untuk pemutakhiran RTS-PM, tapi kan Kades itu biasanya wegah ya, jadi SKRTM aja mereka gak ngajukan.
D5	Dimana titik distribusi dan titik bagi ditetapkan?	Disini sistemnya ada yang lewat dusun, nanti masyarakat belinya ke pak RT, pak RT ke pak Kasun, jadi nanti didrop gitu lo. Ada yang kalau dikemuning itu ngecer, RTSPM nya itu langsung ke desa, kalau yang dijatimulyo itu per RT jadi lewat RT nya, sebenarnya kan lebih efektif yang di Dusun itu, soalnya kan RTS PM nya mau nebus beras kan kerja biasanya, karna kebijakan itu akhirnya dibagi dua, kan kasian hanya nebus beras segitu sampek libur kerja. Kan lebih efektif juga yang lewat RT itu tadi. Ya tergantung Desanya mau

		gimana ngaturnya..
E	Mekanisme Pelaksanaan	
E1	Bagaimana proses sosialisasi Raskin?	<p>Awal penerimaan Raskin itu kan kita sosialisasi di kabupaten (awal pembagian Raskin dalam satu Tahun), setelah itu kan pak camat mengundang Kades untuk sosialisasi dikecamatan, lah itu desa harusnya juga menindak lanjuti dari sosialisasi itu yang dari bupati. Setelah dari sini Kadesnya kan sosialisasi ke Desa ke masyarakatnya.</p> <p>Isinya ya penyampaian pagu, trus misalnya dari kecamatan harus mantau sampai pada titik distribusi kan gitu, jadi kalau ada Raskin itu saya yang keliling, ada ada masalah apa tidak gitu lo. Iya pkok'e ada Raskin kita keliling, dulu itu pernah dicangkring kalau gak salah hari jum'at, sudah diterima semua uangnya, ternyata sampek setelah jumatun bulan datang akhirnya saya yang nelpon ke dolog, dikomplen orang-orang didesa gimana ini mbak Erma kok belum datang, ternyata kami konfirmasi ke dolog masih diperjalanan katanya. Ya monevnya ya saya sebatas ada masalah nggak gitu dalam distribusinya. Ndak pernah ada masalah gitu. Iya isinya ya himbauab-himbauan, setelah kita dapat pagu dari kabupaten, ya kita menjelaskan itu, kita kan punya DPM 1, ya pak Kades harus membagi sesuai DPM 1 itu.</p> <p>Kalau setiap bulannya, kan sebelum dapat raskin satu minggu sebelumnya kita dapat surat, kita sampaikan ke setiap desa lewat surat. Kalau sosialisasi untuk tahun yang pertama misalnya awal tahun, kalau tiap bulannya nggak. Kalau miskan ada tambahan pagu kita sosialisasi juga, kan setelah surat kita sampaikan ke desa nanti desa menyampaikan ke Kasun-kasunnya, trus nanti ke RT-RT nya.baru kemasyarakat</p>
E2	Bagaimana penyaluran Raskin dari Tb ke TB hingga RTS PM	
1	Berapa Jumlah beras Raskin yang diterima masyarakat?	Ya kan itu mbak, di desa bnyak yang minta gitu lo, jadi gak sama , tapi kadang itu dibagi dua sama Kadesnya itu.

2	bagaimana penentuan jumlah beras yang diterima masyarakat	kan memang mungkin gak Cuma di Jenggawah ya, saya kira disemua kecamatan itu ya dibagi rata, tapi ya mungkin satu sak itu dibagi dua, atau paling banyak itu dibagi tiga, kan saya mesti konfirmasi ke pak Kades ya kayak ke pak Kades cangkring itu, ya ngasi himbauan, kadesnya bilang, sekarang berasnya saya bagi empat mbak Erma.” Ya kalau bisa jangan lah pak kan pemerataan sekali ya, kasian lah ya seharusnya berhak itu. Tapi kan orang Desa itu kan kayak gitu mbak ya, kalau gak dikasi itu kerumah pak RT nya, kayak tetangga saya, orangnya gitu lah punya, sawah juga punya, ekonominya juga cukup, ke rumah pak RT, “aku yo podo wargamu gak mbok ke’i?”. Tapi kalau gitu diteruskan kan akhirnya semua mintak kan, cumak kalau pak kasun kalau saya tanya itu ya “ ndak mbak, sakmunu iku wes mbak” katanya.
3	Bagaimana Jadwal alokasi Raskin setiap bulannya?	Untuk yang 2014 ini mbak, kita ada 13 bulan alokasi untuk tahun 2014, lah jadwalnya ini juga gak tentu kayak yang januari aja ini baru pelaksanaannya malah di bulan februarinya, gak tentu memang.
E3	Berapakah harga tebus raskin yang harus dibayar masyarakat untuk setiap kilogram beras?	lo kan kita dapat harga tebus dari sana, ada harganya 1600 perkilo, Memang kan sudah ada kesepakatan mbak, jadi kan kalau apa ya, kita kan distribusinya ada di desa, trus karna didropnya nanti ke RT, kan butuh transport, warga juga memberikannya dengan sadar, seribu atau dua ribu kita ke balai desa, kita kehilangan waktu juga kan, jadi kan kasian, iya itu memang ada tapi itu sudah kesepakatan RTS-PM nya itu.
E	Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana Raskin Desa kepada pelaksana koordinasi kecamatan?	Kalau pelaporannya dari desa awal tahun kan ada berita acara, kesepakatan kan, pagu raskinnya dari jember kan sekian, RTS PM nya yang nerima sekian. setelah itu, ya kesepakatan pas acra muskel itu ya sekaligus sosialisasi, kan kepala desanya sepakat Raskinnya di Desa dapat sekian sudah diterima gitu lo, setelah itu, setiap bulannya, setelah pelaksanaan Raskin, petugas Raskin Desa itu mengirim kesini DPM 2, jadi berita acara penjualan itu, kan karena per Dusun, tanda tangan dari masing-masing penerima ya ditanda tangani

		<p>kasunnya, soalnya kan, karena yang beli kan sebenarnya RTS PM nya tapi yang ngambil kan dusunnya ya to, kan kayak kita gak mungkin keliling untuk mencari satu persatu, dulu itu diharuskan sih, harus satu-satu. Ya dari desa kesini itu berupa DPM 2. Trus kita laporan kesana, kita kan awal tahun itu, ada muscam, bagian ekonomi, dolog, trus dsini, juga desa juga punya arsip sendiri, untuk DPM satu juga gitu, DPM satu itu kan isinya daftar penerima manfaat itu, setelah itu tiap bulannya DPM 2.</p>
--	--	--





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 645 /UN25.3.1/LT/2015 07 Mei 2015
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Pemerintah Kabupaten Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor :
1560/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 05 Mei 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Riska Yulinda/110910301005
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember
Alamat / HP : Jl. Karimata IV No. 18 Jember/HP. 085749889529
Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin
(Raskin) Tahun 2014 (Evaluasi Pada Desa Sruni, Kecamatan
Jenggawah, Kabupaten Jember)
Lokasi Penelitian : Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua bulan (07 Mei 2015 – 07 Juli 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa
yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Jenggawah Kabupaten Jember
di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/838/314/2015

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 645/UN25.3.1/LT/2015 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Riska Yulinda 110910301005
Instansi : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial / FISIP / Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :
"Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 (Evaluasi Pada Desa Seruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)".
Lokasi : Desa Seruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Tanggal : 11-05-2015 s/d 11-07-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 11-05-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

Dis/MOH. HASYIM, M.Si.
Pembina Tingkat I
195902131982111001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
2. Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
Jl. Achmad Yani Nomor 01 Telp. (0331) 757328 Jenggawah - Jember (68171)

Jenggawah, 04 Mei 2015.

Nomor : 072/213 /35.09.16/2015.
Sifat : Penting / Segera.
Lampiran : -----
Perihal : Ijin Penelitian.

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Desa Sruni.

di -
S R U N I

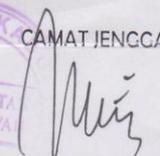
Dasar Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 072/838/314/2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, maka dengan ini mohon bantuan saudara untuk memfasilitasi permintaan data dan tempat yang dibutuhkan sesuai permintaan dalam rangka Penelitian ,

Kepada :

Nama : RISKY YULINDA.
Instansi / Fak : Ilmu Kesejahteraan Sosial / FISIP Universitas Jember.
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember.
Keperluan : Melaksanakan Penelitian tentang " Evaluasi Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 di Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ".
Lokasi : Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
Waktu : dari tanggal 11 Mei s/d 11 Juli 2015.
Catatan :

1. Kegiatan ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT JENGGAWAH

BAMBANG SAPUTRO, SH. Msi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740713 199311 1 003

Tembusan
Yth. Sdr.

Deban FISIP Universitas Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA SRUNI

Jalan Ky. Jais Nomor 72 Kode Pos 68171

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember

Di-

Jember

Dengan ini kami memberitahukan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Riska Yulinda

Nim : 110910301005

Alamat : Jl. Karimata 04 No. 28A Jember

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang 'Evaluasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2014 (Evaluasi pada Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember'. Waktu pelaksanaan 11 mei s/d 11 juli 2015.



KEPALA DESA SRUNI

HIMANANG KUSMINARNO, S.H.